

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



Evi Yulianti Arifin
NPM : 147110296

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Evi Yulianti Arifin
NPM : 147110296
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Ketua,

Pekanbaru, 16 Febuari 2022
Pembimbing,

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

Kartius, S.Sos., M.Ap

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Evi Yulianti Arifin
NPM : 147110296
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana..

Ketua,

Kartius, S.Sos., M.Ap.

Pekanbaru, 16 Febuari 2022
Sekretaris,

Made Devi Wedayanti, S.AP., M.Si.
Anggota

Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si.

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Evi Yulianti Arifin
NPM : 147110296
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 16 Febuari 2022

Ketua

An.Tim Penguji
Sekretaris,

Kartius,S.Sos., M.Ap.

Made Devi Wedayanti,S.AP.,M.Si.

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I ,

Program Studi Administrasi Publik
Ketua .

Indra Safri S.Sos, M.Si

Lilis Suryani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.

4. Bapak Eko Handriyan, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberi motivasi kepada penulis.
5. Bapak Kartius, S.Sos., M.Ap selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan motivasi serta membimbing penulis dengan sabar untuk meluangkan waktu dan membagikan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
8. Seluruh Pegawai di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian serta memberikan informasi yang akurat serta respon yang sangat baik.
9. Bapak Anggota Dewan Komisi IV yang telah menerima penulis dengan tangan terbuka dan bersedia menjadi objek penelitian bagi penulis serta memberikan informasi seputar penelitian.
10. Teristimewa dengan ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada yang terkasih untuk Papa Julianus Arifin (Alm) cinta pertamaku, terima kasih sudah menjadi papa terhebat selama papa masih

hidup surga bersamamu papa, terima kasih Bapak Drs. Darwis ALIHU SH.,M.SI (Alm) Bapak yang insya Allah sudah berada di Jannah. Seseorang yang selalu menginspirasi dan membuat kagum, dan Oma tercinta Djaliah Arifin (Alm) terima kasih atas curahan kasih sayang yang tulus serta untaian doa yang beliau panjatkan selama beliau masih hidup, Oma yang menginspirasi dan membuat kagum cucu-cucunya, Insya Allah Oma sudah berada di Jannah dan beserta keluarga besar yang tidak henti-hentinya memberikan doa motivasi dan dukungan baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan studi.

11. Ibunda Yasmara yang telah memberikan semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
12. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku Muhammad Arif, Youpick Endan Tricia, Hera Maulidya Zarda S.AP, Maya Odina S.AP, Yulius S.AP, Muhammad Ikram S.AP, Muhammad Sabastian S.AP, dan Muhammad Rezky Ermansyah beserta teman-teman seangkatan 2014 Prodi Administrasi Publik kelas F yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a serta memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis memohon dan berdo'a kepada yang maha kuasa semoga jasa baik mereka semua dibalas dengan rahmat dan pahala yang setimpal serta mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Aamiin.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin mengerahkan tenaga dan pikiran penulis untuk membuat skripsi ini dengan sebaik mungkin. Terlepas dari itu, kritik dan saran yang bersifat positif penulis harapkan dari semua pihak guna penyempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kepada seluruh pihak yang bersangkutan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis dan umumnya untuk pembaca yang budiman. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 16 Februari 2022

Penulis,

Evi Yulianti Arifin



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
SURAT PERNYATAAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	26
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	26
1. Tujuan Penelitian	26
2. Kegunaan Penelitian	26
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	28
A. Studi Kepustakaan	28
1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik	28
2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik	30
3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik.....	31
4. Konsep Kebijakan Publik.....	33
5. Konsep Implementasi Kebijakan.....	37
6. Konsep Perawatan dan Pemeliharaan.....	39
B. Kerangka Pikir.....	41
C. Konsep Operasional.....	42
D. Operasional Variabel	45
BAB III : METODE PENELITIAN	46
A. Tipe Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	46
C. Key Informan Penelitian.....	47
D. Teknik Penarikan Informan.....	48
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data	49
G. Teknik Analisis Data	50
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	51
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	52
B. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	53

C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	54
D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.....	56
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Identitas Responden.....	63
B. Hasil Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru ..	66
1. Tahap Perencanaan	66
2. Tahap Implementasi Program dan Proyek-Proyek Pembangunan.....	76
BAB VI : PENUTUP	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN	91
LAMPIRAN.....	95



DAFTAR TABEL

Tabel		
Halaman		
I.1 :	Jumlah Lampu Penerangan Jalan Kota Pekanbaru menurut Rayon	5
I.2 :	Jenis Lampu Penerangan Jalan Secara Umum Menurut Karakteristik dan Penggunaannya.....	9
I.3 :	Daftar Lampu Penerangan Jalan umum yang menjadi kewenangan Dinad Perhubungan kota Pekanbaru	14
I.4 :	Daftar Lampu Penerangan Jalan Umum yang dalam perawatan PJU Kota Pekanbaru tahun 2021.....	18
I.5 :	Daftar Kegiatan Pemeliharaan PJU Kota Pekanbaru tahun 2021 ...	19
I.6 :	Data Prasarana Kendaraan Oprasional Pemeliharaan Lampu penerangan Jalan umumdi Kota pekanbaru.	20
I.7 :	Data Personil Teknisi Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru.....	21
I.8 :	Data Laporan Pengaduan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru 2021	23
I.9 :	Jumlah Titik Lampu Jalan di Setiap Blok menurut Rayon Kota Pekanbaru.....	24
II.1 :	Operasionalisasi Variabel Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	46
III.1 :	Key informan dan informan Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	47
III.2 :	Jadwal Kegiatan Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	51
V.1 :	Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin.....	63

V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Umur.....	64
V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pikir Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	41
IV.1 : Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Wawancara Untuk Kepada Dinas Perhubungan dan Kasubag Program Kota Pekanbaru. Tentang Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	96
2. Daftar Wawancara Untuk Kabid KTSP dan Kasi penerangan jalan umum Kota Pekanbaru. Tentang Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	101
3. Daftar Wawancara Untuk Kepada Mandor dan Teknisi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tentang Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	106
4. Daftar Wawancara Untuk Kepada Anggota DPRD Kota Pekanbaru Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	112
5. Dokumentasi Foto Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	117
6. Surat Keterangan Plagiasi.....	130
7. Surat Keputusan Dari Dekan FISIPOL UIR Nomor 408 /UIR-Fs/Kpts/2021 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing penulisan Skripsi Mahasiswa.....	131
8. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Perihal Izin Riset Dan Pengumpulan Data Bahan Skripsi Evi Yulianti Arifin	132
9. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan politik perihal izin riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi Evi Yulianti Arifin	133
10. Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tentang Perihal Surat Keterangan penelitian untuk Evi Yulianti Arifin	134
11. Surat Keterangan Penelitian Dari Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Pekanbaru Tentang Perihal Surat Keterangan penelitian untuk Evi Yulianti Arifin.....	135

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Evi Yulianti Arifin
NPM : 147110296
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 16 Febuari 2022
Pelaku Pernyataan,

Evi Yulianti Arifin

**ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM PERAWATAN DAN
PEMELIHARAAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM
DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Evi Yulianti Arifin

Kata Kunci : Pelaksanaan, Perawatan, Pemeliharaan, Lampu Penerangan Jalan Umum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru. Indikator penilaian yang dipergunakan meliputi Tahap Perencanaan dan Tahap Implementasi Program dan Proyek-Proyek Pembangunan. Tipe penelitian ini adalah survei diskriptif, yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini dijadikan bahan utama untuk menganalisis kondisi empiris dan objektivitas penelitian ini. Adapun informan pada penelitian ini yaitu berjumlah 12 orang. Jenis dan teknik pengumpulan data terdiri dari data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, serta data sekunder yang menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik triangulasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Perawatan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya belum maksimal diketahui bahwa dalam hal kesiapan organisasi untuk melaksanakan program Perawatan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung serta anggaran masih belum mencukupi sehingga banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan seperti pergantian lampu dengan jumlah kesediaan lampu yang terbatas, maka dari itu belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

**THE ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF PUBLIC STREET LIGHTING
MAINTENANCE AND MAINTENANCE PROGRAM IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Evi Yulianti Arifin

Keywords: Implementation, Maintenance, Maintenance, Public Street Lighting;

This study aims to determine and analyze the Implementation of the Maintenance and Maintenance Program for Public Street Lights in Pekanbaru City. The assessment indicators used include the Planning Phase and the Implementation Phase of Development Programs and Projects. This type of research is a descriptive survey, which prioritizes the interview list as a data collection tool and the data collected with this tool is used as the main material to analyze the empirical conditions and the objectivity of this research. The informants in this study amounted to 12 people. The types and techniques of data collection consist of primary data collected using interview techniques, and secondary data using observation and documentation techniques. While the data analysis technique used is triangulation technique. Based on this analytical technique, the researchers assessed and concluded that the Analysis of the Implementation of the Maintenance and Maintenance Program for Public Street Lighting Lights in Pekanbaru City was in the category of Sufficiently Implemented. The inhibiting factor is that the Department of Transportation is the sole actor in the implementation of the maintenance and maintenance program for public street lighting in Pekanbaru City and does not cooperate with third parties, besides that in terms of budget conditions and facilities and infrastructure that are still lacking, then from the amount of resources needed Limited resources are an obstacle in handling complaints from the people of Pekanbaru City and the vast area of Pekanbaru City is not proportional to the number of resources and facilities owned by the Pekanbaru City Transportation Service, so that the implementation of the maintenance and maintenance program for public street lighting in Pekanbaru City has not been able to run optimally.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki populasi penduduk yang tinggi dan wilayah yang besar. Negara yang memegang status negara berkembang, Indonesia memiliki keinginan agar dapat mensejahterakan penduduknya. Dibentuknya negara Indonesia dan pemerintah ialah pelaksana negara juga pelaksana tugas kenegaraan mengarah kesejahteraan bangsa Indonesia disebut sebagai kesejahteraan negara.

Pemerintahan adalah organisasi atau lembaga dengan legitimasi yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi untuk melaksanakan tugas terkait pemerintahan. Pemerintah juga memiliki alat-alat kelengkapan Negara. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan membutuhkan kerjasama antar instansi pemerintahan atau disebut dengan administrasi. Istilah administrasi merujuk pada kerja sama antara dua pihak atas dasar rasionalitas yang ditentukan untuk tujuan tertentu (Siagian dalam Syafri, 2012;9).

Administrasi erat kaitannya dengan organisasi formal, non formal, provit, maupun publik. Organisasi dijelaskan oleh Money (dalam Zulkifli, 2015:99) merupakan bentuk perserikatan atau asosiasi manusia yang bertujuan mencapai tujuan bersama. Organisasi mejadi wadah bagi setiap anggota yang terlibat untuk meraih tujuan bersama dengan menggunakan sumber daya tertentu. Oleh karena sumber daya tersebut bersifat terbatas, maka diperlukan kegiatan manjaerial. Kegiatan ini berfungsi mengatur dan menyesuaikan sumber daya yang dimiliki dengan pencapaian tujuan organisasi. Organisasi bisa dikelola dengan baik dan mencapai tujuan, jika didukung oleh potensi dan pengelolaan sumber daya

organisasi secara terstruktur. Segala bentuk sumber daya dalam organisasi harus dikelola untuk mencapai tujuan. Tata cara pengolahan sumber daya organisasi ini secara umum di sebut dengan manajemen. Menurut Siagian (dalam Andry, 2015;12) pengertian dari manajemen adalah tata laksana yang dilakukan untuk memperoleh tujuan yang diinginkan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh orang lain.

Organisasi yang ingin memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan memerlukan anggota yang memiliki kinerja optimal. Organisasi menjadi suatu wadah untuk pelaksanaan administrasi agar dapat dijalankan sesuai tugas dan fungsinya. Sama halnya dengan negara sebagai suatu sebagai organisasi besar yang tidak terlepas dari berbagai tujuan bersama yang ingin diraih.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai angkutan jalan dan Lalu Lintas dalam pasal 25 dipaparkan setiap jalan yang dipergunakan sebagai lalu lintas umum diharuskan lengkap dengan perlengkapan jalan seperti penerangan jalan untuk kenyamanan juga keamanan pemakai jalan. Badan Standardisasi Nasional (2008) mengatakan bahwa penerangan jalan merupakan sebagian perlengkapan, penerangan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang diperoleh dan ditempatkan di bagian kanan ataupun kiri jalan atau juga di bagian median jalan yang berguna untuk menerangi jalan juga lingkungan disekitaran jalan yang termasuk pertukaran, persimpangan, jembatan, dan jalan bawah tanah (terowongan atau underpass). Lampu pada jalan merupakan bagian lengkap yang terdapat elemen optic, sumber cahaya, struktur pendukung, dan elemen listrik serta pondasi tinga lampu.

Kepentingan umum yang merupakan salah satu tanggung jawab dari pelayanan Pemerintah Daerah adalah Penerangan Jalan Umum (PJU). Penerangan jalan umum menjadi penunjang infrastruktur jalan disaat malam hari, karena lampu jalan ini dapat membantu para pengendara untuk lebih nyaman dalam berkendara di malam hari. Sama halnya dengan jalan rusak tentunya akan membuat bahaya para pengendara dan kurang nyaman saat melintasi jalan tersebut, maka akan terasa nyaman jika pada malam hari terdapat penerangan jalan yang membantu pengendara jalan untuk melintasi jalan tersebut. Dengan dipasangnya lampu penerangan jalan, maka diharapkan dapat mengurangi jumlah musibah berupa kecelakaan lalu lintas pada malam hari yang diakses oleh kendaraan roda dua dan roda empat. Selain itu, dengan adanya penerangan lampu jalan akan menambah keindahan suatu kota.

Penerangan jalan umum adalah bagian dalam bentuk pelayanan dari pemerintah kota yang dipergunakan untuk manfaat umum, seperti individu yang menggunakan jalan pada saat malam hari. Apabila terdapat jalanan gelap, hal tersebut menunjukkan pelayanan pemerintah kota bahwa pelayanan tidak optimal. Pemerintah Pekanbaru dalam mewujudkan kewajiban sebagai pemerintah Kota, memberikan pelayanan ini dengan memungut biaya PJU yang biasanya langsung dipungut kepada pelanggan PLN. Maka, setiap pelanggan PLN membayar pajak sebesar 10%. Pajak harus dibayarkan karena menjadi hak dan kewajiban seluruh masyarakat. Kemudian, pemerintah kota memiliki kewajiban untuk mengelola pajak tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik karena masyarakat sebagai pelanggan telah memenuhi kewajiban membayar pajak. Namun demikian,

ditemukan bahwa terdapat fenomena beberapa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru yang tidak berfungsi dan padam saat malam hari. Penduduk telah membayarkan pajak demi layanan tersebut, sehingga masyarakat merasa tidak nyaman, tidak aman, dan menjadi terganggu. Selain itu, tidak terwujudnya biaya pajak penerangan pada jalanan umum bisa mengecawakan masyarakat. Beberapa bagian jalanan yang penerangannya tidak baik, masih terdapat sejumlah jalanan yang tidak memiliki lampu penerangan, seperti jalan Dharma Bakti, Sigungung Ujung Palas, Garuda Sakti km 3. Di jalan paus dan sebagian air hitam Penerangan jalan ditemukan telah rusak, tetapi belum diperbaiki.

Kota Pekanbaru ialah Ibu Kota dari Provinsi Riau yang menjadi tempat utama pemerintahan dan perkembangan daerah tersebut. Kota Pekanbaru menjalani perkembangan yang cepat karena memiliki banyaknya masyarakat yang tinggi juga pembangunan yang luas. Oleh karena perkembangan yang pesat, Kota Pekanbaru dituntut untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang akan digunakan oleh masyarakat. Salah satunya ialah penyediaan dan perbaikan lampu penerangan jalan umum. Hal ini penting dan menjadi kebutuhan masyarakat untuk penerangan seluruh jalan di kota Pekanbaru dengan tujuan mengurangi kejadian kecelakaan dan tindak kriminalitas.

Kota tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan lampu penerangan, hal ini diketahui bahwa kebutuhan lampu penerangan jalan itu sangat penting atau mendasar, sehingga perkembangan suatu Kota dalam aspek penerangan jalan mempunyai posisi strategis dan harus diperhatikan oleh pemerintah kota, maka dari itu lampu penerangan jalan sangat dibutuhkan sekali dalam memberikan keamanan,

kenyamanan kota dan juga dapat mencegah serta mengurangi tindakan kriminalitas di jalan raya.

Salah satu permasalahan mengenai fasilitas umum di Kota Pekanbaru ialah lampu penerangan jalan umum (PJU) banyak terdapat di jalan utama Kota Pekanbaru, Riau padam dikarenakan rusak dan kurang terawat serta tertutupi pohon-pohon di tepi jalan. Untuk lebih jelasnya mengenai persebaran lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru Rayon menjelaskannya pada tabel dibawah tersebut:

Tabel I.1: Tabel Lampu Penerangan Jalan Meterisasi dan Non Meterisasi Kota Pekanbaru menurut Rayon Tahun 2021

No	Rayon	Meterisasi	Non Meterisasi	Total
1.	Kota Timur	534	242	776
2.	Kota Barat	346	295	641
3.	Simpang Tiga	60	208	268
4.	Rumbai	182	138	320
5.	Panam	194	411	605
	Total	1.316	1.294	2.610

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Dapat dilihat dari daftar tabel tersebut bahwa Lampu Penerangan Jalan bermeterisasi lebih banyak dibandingkan lampu jalan yang non meterisasi, artinya sudah banyak lampu jalan yang menggunakan lampu bermeterisasi. Namun, dapat dilihat pada rayon Panam masih terdapat banyak lampu jalan yang non meterisasi, yaitu sebanyak 411.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan unit yang mempunyai tanggung jawab dan fungsi untuk membangun fasilitas umum dalam mengelola dan melakukan perawatan lampu penerangan jalan umum yang menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 mengenai Susunan Organisasi, Tugas, Kedudukan dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,

kegiatan perawatan lampu penerang jalan umum secara langsung dilaksanakan Bidang Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana melalui Seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun berikut tugas Seksi Penerangan Jalan Umum sebagai berikut.

1. Merumuskan dan melaksanakan persiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis serta jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut di tempat kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari-hari mendatang.
3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tugas.
4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidang tugasnya.
5. Pelaksanaan analisa rencana pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU).
6. Melaksanakan perencanaan pembangunan LPJU.
7. Melaksanakan pembangunan LPJU.
8. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan LPJU.
9. Menyusun rencana kerja dan anggaran seksi.
10. Merumuskan, melaksanakan, dan menghimpun peraturan dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan seksinya.
11. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penerangan Jalan Umum menjadi kebutuhan masyarakat yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru. Sarana penerangan jalan ini berada dibawah kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, termasuk dalam bentuk penyediaan dan perawatan lampu penerangan jalan. Kewajiban dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dimulai dari pemasangan, pendataan, sampai kepada perawatan agar penerangan jalan dalam kondisi yang baik. PJU dipasang, dipelihara dan dibayar rekeningnya oleh Pemerintah Kota sesuai kontrak atau perjanjian yang

telah disepakati dengan PLN dan merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemkot melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sementara tugas PLN hanya memungut PPJ yang dibayarkan pelanggan PLN bersamaan dengan pembayaran rekening listrik. Selanjutnya pembayaran ini akan disetorkan ke kas Pemerintah Kota.

Lampu Penerangan Jalan Umum atau LPJU menjadi bagian dari penataan suatu daerah atau kota. LPJU disediakan untuk mempermudah masyarakat melihat jalan ketika telah memasuki waktu malam hari atau dalam keadaan gelap. LPJU memiliki peranan meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat yang menggunakan jalan pada malam hari. Selain itu, LPJ dapat berdampak lebih baik terhadap kehidupan sosial masyarakat. LPJU sebagai penerangan jalan di Kawasan perkotaan memiliki fungsi sebagai berikut ini.

1. LPJU berfungsi menghasilkan kontras antara obyek yang ada dengan permukaan jalan raya.
 2. LPJU berfungsi menjadi alat untuk membantu navigasi pengguna jalan.
 3. LPJU berfungsi meningkatkan keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan, khususnya ketika malam hari (gelap).
 4. LPJU berfungsi mendukung keamanan yang ada di lingkungan.
- LPJU dalam masyarakat dalam prakteknya mengenal istilah LPJU resmi dan

LPJU tidak resmi. LPJU resmi memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. LPJU Meterisasi
 - a) Dibangun oleh Pemerintah (dana APBN).
 - b) Bersifat Legal (resmi).
 - c) Sesuai standar pemasangannya.
 - d) Menggunakan Kwh Meter.
 - e) Pemeliharaan, perawatan dan pengawasan oleh pemerintah daerah.
2. LPJU Non Meterisasi
 - a) Dibangun oleh swasta / masyarakat (swadaya).
 - b) Bersifat ilegal (tidak resmi).
 - c) Tidak sesuai standar LPJU.
 - d) Tidak Terukur (Non APP).

- e) Pengaktifan lampu dilakukan manual/otomatis dengan saklar *photocell*, bahkan ditemukan lampu menyala selama 24 jam
- f) Pemeliharaan dan perawatan dan pengawasan oleh masyarakat.

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah hak yang dapat diperoleh oleh masyarakat, sebagaimana masyarakat telah membayarkan kompensasi iuran PJU melalui tagihan rekening listrik PLN. Minat masyarakat terhadap tersedianya PJU sangat tinggi, sehingga kerap menimbulkan pengadaan PJU yang tidak resmi. Pertumbuhan PJU menjadi tidak terbendung. Sebagian besar PJU tidak memiliki izin dan menggunakan lampu dengan tingkat penerangan yang tinggi, tetapi tidak hemat energi. Timbulnya PJU tidak resmi dikarenakan masyarakat sudah memenuhi kewajibannya membayar Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) akan tetapi masyarakat tidak mendapatkan haknya atas Penerangan Jalan Umum yang seharusnya tersedia. Ketiadaan penerangan jalan akhirnya menjadikan masyarakat melakukan pemasangan PJU secara mandiri tanpa memenuhi persyaratan yang berlaku. Selain itu, terdapat penambahan titik lampu PJU, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab, sehingga mengakibatkan besarnya tagihan listrik karena adanya listrik non meterisasi atau ilegal. Pemasangan Penerangan Jalan Umum secara ilegal ini sekaligus menjadi tindak pencurian listrik.

Klasifikasi dan kegunaan lampu penerangan jalan sudah tercantum pada SNI No 7391 tahun 2008 yang berisi tabel dengan penjelasan tentang karakteristik lampu penerangan jalan beserta penggunaannya, sehingga pemasangan lampu pada jalan raya dapat diperhatikan melalui tabel tersebut. Adapun jenis-jenis lampu penerangan jalan yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru secara

umum menurut karakteristik dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel I.2 : Jenis Lampu Penerangan Jalan Secara Umum Menurut Karakteristik dan Penggunaannya.

Jenis Lampu	Efisiensi rata-rata (lumen/ jam)	Umur rencana rata-rata (jam)	Daya (watt)	Pengaruh terhadap warna obyek	Keterangan
Lampu tabung fluorescent tekanan rendah	60 – 70	8.000–10.000	18 - 20; 36 – 40	Sedang	<ul style="list-style-type: none"> - untuk jalan kolektor dan lokal; - efisiensi cukup tinggi tetapi berumur pendek - jenis lampu ini masih dapat digunakan untuk hal-hal yang terbatas.
Lampu gas sodium bertekanan rendah (SOX)	100 -200	8.000 - 10.000	90; 180	Sangat buruk	<ul style="list-style-type: none"> - untuk jalan kolektor, lokal, persimpangan, terowongan, tempat peristirahatan - efisiensi sangat tinggi, umur cukup panjang - ukuran lampu besar sehingga sulit untuk mengontrol cahayanya - jenis lampu ini dianjurkan digunakan karena faktor efisiensinya yang sangat tinggi.

Lampu gas sodium tekanan tinggi (SON)	110	12.000-20.000	150;250 ; 400	Buruk	<ul style="list-style-type: none"> - untuk jalan tol, arteri kolektor, persimpangan besar/luas dan interchanger; - efisiensi tinggi, umur sangat panjang, ukuran lampu kecil, sehingga mudah pengontrolan cahayanya; - jenis lampu ini sangat baik dan sangat dianjurkan untuk digunakan.
---------------------------------------	-----	---------------	---------------	-------	--

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di Kota Pekanbaru (a) menimbang bahwa Lampu penerangan jalan umum merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan. Kemudian pada pasal 1 ayat 6, menyebutkan bahwa Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat LPJU adalah penggunaan listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi, Kota dan Lingkungan, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan dilakukan oleh pemerintah kota, masyarakat, dan rekening listriknya dibayar oleh pemerintah kota. Hal ini juga sesuai ketentuan pada bab III pasal 4, disebutkan bahwa Lokasi pemasangan LPJU berada di jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan Kota, jalan

Lingkungan dan Gang dalam wilayah Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam bab IV pasal 5, mengenai pemasangan LPJU disebutkan bahwa:

- (1) pemasangan LPJU dibedakan antara LJU yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dan LPJU yang dipasang secara swadaya;
- (2) LPJU yang dibangun oleh pemerintah kota Pekanbaru ditempatkan di ruas jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota;
- (3) Pemasangan LPJU secara swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dan calon pelanggan membayar BP dan UJL di kantor Pelayanan PLN setempat.

Selanjutnya adapun Prosedur Pemasangan LPJU sesuai yang tertera pada bab V pasal 6, Prosedur pemasangan LPJU yang dibangun oleh pemerintah Kota Pekanbaru adalah :

- (1) Masyarakat mengusulkan pemasangan lampu jalan melalui musyawarah, perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) yang dimulai dari tingkat kelurahan dan kecamatan.
- (2) Usulan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP).
- (3) DKP melakukan survey ke lapangan, membuat gambar perencanaan dan menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (4) Menyurati PT. PLN (Persero) tentang ketersediaan daya di lokasi yang telah di survey.
- (5) Apabila daya tersedia, pembangunannya diusulkan kepada pemerintah Kota Pekanbaru.
- (6) Jika dana tersedia, diakomodir dalam kegiatan tahun berikutnya.
- (7) Pemasangan LPJU dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Selanjutnya mengenai Ketentuan Teknis LPJU sesuai yang tertera pada bab VII pasal 9, Ketentuan teknis LPJU yang dibangun oleh pemerintah Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut

- (1) Menggunakan jenis lampu high pressure sodium dan sodium, daya 250 watt dan 400 watt. Dengan pencahayaan berwarna kuning
- (2) Menggunakan ballast, capasitor dan ignitor,
- (3) Menggunakan jaringan sendiri,
- (4) Menggunakan panel box komplit sendiri,
- (5) Menggunakan KWh meter;

- (6) Tinggi tiang maksimal 13 meter dari jarak antar tiang maksimal 150 meter,
- (7) Jarak titik lampu 50 meter atau 100 meter, tergantung kondisi di lapangan,
- (8) Material yang digunakan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selanjutnya mengenai Ketentuan Teknis LPJU sesuai yang tertera pada bab VII pasal 10, Ketentuan teknis LPJU yang dibangun oleh Swadaya yang di bangun oleh masyarakat/ Developer :

1. Untuk Perumahan yang menggunakan daya listrik rata-rata lebih kecil atau sama dengan 1300 VA, harus menggunakan LPJU dengan enis lampu hemat energi (LHE) dan daya maksimal 75 watt pertitik lampu.
2. Untuk perumahan yang menggunakan daya listrik rata-rata lebih besar atau sama dengan 2200 VA, harus menggunakan LPJU dengan jenis sebagai berikut:
 - Lampu hemat energi (LHE) dengan daya maksimal 75 watt per titik lampu.
 - Atau lampu high pressure sodium dan sodium, daya maksimal 150 watt pertitik lampu, pencahayaan berwarna kuning, dilengkapi dengan ballast, capasitor,dan ignitor.
3. Menggunakan jaringan sendiri.
4. Menggunakan panel box komplit tersendiri.
5. Menggunakan Kwh meter (alat ukur).
6. Tinggi tiang maksimal 9 meter dan arak antara tiang maksimal 50 meter.
7. Jarak Titik lampu 50 meter, tergantung kondisi di lapangan.
8. Material yang digunakan sesuai dengan Standar Nasional (SNI).

Selain dari ketetapan standarisasi LPJU pemerintah dan swadaya masyarakat lebih khususnya pada tahan perawatan dan pemeliharaan LPJU.

Adapun Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam perawatan dan pemeliharaan lampu Penerang jalan Umum sebagai berikut:

1. Laporan dari pengawas yang melakukan kegiatan pengawasan setiap hari dapat juga berupa laporan dari masyarakat yang disampaikan melalui call center pada bagian Binmas
2. Seluruh laporan yang dimasukkan disampaikan oleh pengawas kepada Kasi sebagai penanggung jawab pelaksanaan penerangan jalan Kota Pekanbaru

3. Kasi menerima seluruh laporan tentang lampu jalan dan melakukan rekap laporan dan membuat skala prioritas
4. Setelah diperoleh skala prioritas maka Kasi memerintahkan pengawas untuk melaksanakan pekerjaan pergantian lampu jalan sesuai skala prioritas
5. Pengawas setelah mendapat perintah maka meminta teknisi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan daftar pekerjaan
6. Setelah menerima daftar pekerjaan maka teknisi mempersiapkan peralatan dan mengajukan penggunaan bahan kepada bagian gudang dengan mengisi kartu permintaan.
7. Bagian gudang mempersiapkan bahan yang diajukan oleh teknisi dan menyerahkan kepada teknisi dengan menggunakan tanda terima bahan
8. Teknisi dan pekerja lainnya berangkat menuju lokasi pekerjaan. Setelah tiba langsung menggunakan alat keselamatan dan memeriksa kerusakan yang terjadi.
9. Teknisi melakukan pergantian lampu jalan dengan memperhatikan kaidah operasional elektrik. Dalam proses pergantian teknisi diawasi oleh mandor
10. Setelah pekerjaan pergantian selesai dan lampu jalan hidup kembali maka mandor membuat laporan hasil pekerjaan dan diserahkan langsung kepada Kasi secara tertulis dapat dibuat esok harinya.
11. Kasi menerima laporan hasil pekerjaan dan menyampaikan kepada Kabid
12. Kabid setelah menerima laporan hasil pekerjaan menyampaikan kepada Kepala Dinas.
13. Kepala Dinas menerima laporan hasil pekerjaan.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tabel 1.3:Daftar Lampu Penerangan Jalan Umum yang menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2021.

No.	Keterangan	Lokasi
1.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sekuntum
2.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Pinang Merah
3.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.sultan syarif Kasim
4.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Cemara
5..	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl. Imam Munandar 1
6.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl. Hangtuhah
7.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Badak
8.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Pesantren
9.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Datuk Laksamana
10.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Hangjabat
11.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Arengka
12.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Arengka II Akap
13.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Alamudun Syah
14.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.SM. Amin
15.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Teratai
16.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Nenas
17.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Kulim Ujung
18.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Subrantas
19.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Masjid Raya
20.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Dahlia
21.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Mangga
22.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sudirman Fly Over Simp.Imam Munandar
23.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sudirman Fly Over Simp.T.Tambusai
24.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Dharma Bakti
25.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Kamboja
26.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Terubuk
27.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Siak II Kel.Air Hitam
28.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Rajawali
29.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Pemudi
30.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Tamtama
31.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Bandeng
32.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Agus salim
33.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Todak
34.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Guru Sulaiamn
35.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Cendrawasih
36.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Amal Mulia
37.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Ketitiran
38.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sigunggung
39.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Riau Ujung

40.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Senapelan Bandar
41.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Pepaya Simpang .Durian
42.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Fajar Ujung Labuhan Baru
43.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sudirman (Jembatan siak IV).
44.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Pahlawan Kerja
45.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Karatama
46.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sukarno Hatta (simpag Pasar Pagi)
47.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Utama?T.Bey
48.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Desa Kubang Jaya No.1
49.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Kaharudin Nasution
50.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sekolah
51.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Rusunawa Unilak
52.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Sri Palas
53.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Umban Sari
54.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.yus Sudarso
55.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Limbungan
56.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Yus Sudarso Nelayan
57.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Raja Panjang Okura
58.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.H.Subrantas Panam
59.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Soekarno Hatta tugu Ska
60.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Naga Sakti 1 Unri
61.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Suka Karya
62.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Lobak
63.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Delima
64.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Garuda saki Km 1
65.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Pertanian Kaharudin Nasution
66.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Putri tujuh
67.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Air Hitam
68.	LPJU Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Jl.Kenanga Kulim

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,2021.

Berdasarkan tabel 1.3 diatas Data Daftar Lampu Penerangan Jalan Umum yang menjadi Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2021. Dimana diketahui data diatas adalah Lampu Penerangan Jalan Umum yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bukan lampu Penerangan punya Dinas Pertamanan.

Lampu penerangan jalan umum yang menjadi kewenangan Dishub adalah merupakan perlengkapan jalan yang berguna untuk menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta untuk menambah keindahan lingkungan dan lampu yang menjadi kewenangan dishub adalah LPJU yang dibangun oleh pemerintah kota Pekanbaru ditempatkan di ruas jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota. Sesuai dengan tabel diatas bahwasanya Lampu Penerangan Jalan Umum yang menjadi kewenangan dinas perhubungan di LPJU yang dibangun oleh pemerintah kota Pekanbaru ditempatkan di ruas jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kota; Lampu jalan yang dikategorikan menjadi kewenangan Dishub adalah lampu yang di pasang sepanjang jalan Nasioanal, jalan Provinsi dan jalan kota. Selebihnya apabila di pasang bukan di jalan tersebut berarti bukan lampu jalan kewenangan Dishub.,lampu yang menjadi kewenangan dishub bisa di lihat lampu penerangan jalan parit indah depan kantor pengadilan agama sampaijalan pesantren yang menjadi kewenangan dishub Kota Pekanbaru tidak hidup sama sekali mati total sudah lama tidak di perbaiki.lampu sepanjang jalan SMK pertanian mati total.dan lampu jalan sudirman ke siak IV lampu jaljan milik dishub redup pencahyaannya kurang terang sehingga menghambat dalam berkendara. Sedangkan lampu yang dimiliki Dinas Pertamanan adalah lampu taman merupakan ornamen yang berfungsi sebagai penerangan namun,lampu taman juga tidak hanya menjadi penerangan semata.lampu taman yang dimiliki dinas pertamanan seperti Lampu yang di pasang di taman RTH lampunya untuk keindahan taman tersebut dan lampu jalan DKP arifin ahmad yang mati.

Penerangan Jalan Umum memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang bertujuan untuk mengetahui adanya kerusakan atau gejala kerusakan lebih awal. Dengan demikian, dapat dilakukan tindakan perbaikan yang terencana serta menghindari kerusakan yang bersifat parah atau fatal. Adapun pengertian perawatan itu sendiri adalah sebuah kegiatan memperbaiki suatu alat ketika mengalami kerusakan (perbaikan). Sedangkan pengertian pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala sebelum suatu alat atau produk mengalami kerusakan dan mencegah terjadinya kerusakan

Lampu Penerangan Jalan Umum merupakan bagian dari barang elektronik yang sifatnya rentan dan umur pakai yang pendek. Maka, kebutuhan perawatan dan pemeliharaan terhadap lampu penerangan tersebut bersifat mutlak. Perawatan dilakukan dengan perbaikan jaringan atau pergantian lampu yang tidak berfungsi. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan serta pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum pada ruas-ruas jalan Provinsi, Jalan Nasional dilaksanakan oleh Bidang KTSP melalui Seksi Penerangan Jalan Umum. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara berkala. Tujuannya adalah memelihara lampu PJU agar selalu berfungsi dengan baik dan optimal. Terdapat penjadwalan dalam melakukan kegiatan perawatan dan pemeliharaan lampu jalan. Adapun kegiatan perawatan dan pemeliharaan PJU adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4 : Daftar Lampu Penerangan Jalan Umum yang dalam Perawatan PJU Kota Pekanbaru tahun 2021

No.	Kegiatan	Lokasi
1.	Pemeriksaan jaringan yang Lost Contact	Rayon Kota Timur
2.	Perbaikan LPJU	Sungai Duku
3.	Perbaikan Jaringan	Rayon Kota Timur dan Panam
4.	Pergatian Lampu	Jl. Patria Sari
5.	Perbaikan PJU	Jl. Danau Buatan
6.	Pergatian PJU	Jl. Soetomo dan Jl. Hasanudin
7.	Perbaikan PJU	Jl. Niam Sari
8.	Pemasangan Kabel Putus	Jl. Hangtuh
9.	Perbaikan Jaringan Kabel PJU	Jl. Pendopo Kulim
10.	Perbaikan Tiang Ornamen LPJU	Jl. Yos Sudarso
11.	Perbaikan Sumber Arus APILL	Jl. Sisingamaraja
12.	Perbaikan Jaringan	Jl. Nanas
13.	Pergatian Time Switch PJU	Jl. Garuda
14.	Pergatian Konektor PJU	Jl. Rawasari
15.	Perbaikan Tiang	Rayon Kota Timur dan Panam
16.	Perbaikan Jaringan	Seluruh Rayon
17.	Penyambungan Kabel Putus	Jl. Hangtuh
18.	Perbaikan LPJU	Jl. Sumber sari

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2021 terdapat beberapa kegiatan perawatan yang tersebar di beberapa rayon Kota Pekanbaru. Perawatan dilakukan pada lampu yang mengalami kerusakan karena sifatnya sebagai alat elektronik yang dapat rusak dan membutuhkan pemeliharaan agar selalu berfungsi dengan baik. Adapun kegiatan pemeliharaan PJU yang dilakukan di Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut:

Tabel 1.5 : Daftar Kegiatan Pemeliharaan PJU Kota Pekanbaru tahun 2021.

No.	Kegiatan	Lokasi
1	Penggantian LED	Tenayan Raya
2	Penertiban LPJU	Sungai Duku,
3	Pengecekan Sambungan Meterisasi di	Jl. Soebrantas.
4	Pencatatan Barcode jalan HR.Soebrantas.	Jl. Patria Sari
5	Tarik Jaringan Udara di jalan Nangka	Jl. Danau Buatan
6	Penertiban LHE	Jl. Soetomo
7	Pengecekan jaringan konslet	Jl. Niam Sari
8	Cek Panel di jalan Kesadaran.	Jl. Hangtuah
9	Penarikan Jaringan Udara	Jl. Pendopo Kulim
10	Penyisiran lampu yang mati	Jl. Yos Sudarso
11	Pemindahan line ke meterisasi trafo	Jl. Sisingamaharaja
12	Pengecekan panel KT 850	Jalan. Nanas
13	Pergatian Time Switch PJU	JL. Garud
14	Pergatian Konektor PJU	Jl. Rawasari
15	Pengecekan panel PJU	Rayon Kota Timur
16	Pemasangan Box panel Meterisasi LPJU	Simpang Tiga
17	Penertiban LPJU	Jl. Sumber sari
18	Penarikan Jaringan Udara	Jl. KH.Ahmad Dahlan
19.	Pengecekan jaringan konslet	Jl. Bunga Raya.
20.	Penertiban LHE	Jl. Hasanudin
21.	Penyisiran lampu yang mati	Jl. Riau
22.	Penarikan jaringan	Jl. Hangtuah

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021.

Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa lokasi pemeliharaan PJU berada di seluruh wilayah Kota Pekanbaru. Terdapat banyak kegiatan pemeliharaan yang berarti bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah melakukan banyak pencegahan kerusakan, gangguan penerangan jalan.

Seperti yang telah di jelaskan bahwa setiap organisasi memerlukan sumber daya seperti material dan mesin. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi pemerintah Kota Pekanbaru berfungsi untuk membangun fasilitas kota Pekanbaru yang bertanggung jawab mengelola LPJU untuk memudahkan jalannya pemeliharaan dan perawatan lampu jalan. Terdapat sejumlah prasarana untuk

jalannya pemeliharaan, seperti mobil operasional. Berikut ini adalah data kendaraan operasional yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tabel 1.6: Data Prasarana Kendaraan Operasional Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru

No.	Merk	Jenis	Jumlah
1.	Hino	Mobil Tangga	1 Unit
2.	Mitsubishi Colt Diesel	Mobil Tangga	1 Unit
3.	Mitsubishi Colt Diesel	Mobil Tangga	1 Unit
4.	Mitsubishi Colt Diesel	Mobil Tangga	1 Unit
5.	Grand max	Mobil Tangga	1 Unit
Jumlah			5 unit

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun, 2021.

Dari tabel diatas diketahui bahwa kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu berjumlah 5 unit antara lain merek Hino, Mitsubishi colt Diesel dan merek Mitsubishi colt Diesel kesemua mobil tersebut berjenis mobil tangga yang digunakan untuk perawatan dan pemeliharaan LPJU di Kota Pekanbaru. Tetapi diketahui bahwa kendaraan operasional berupa mobil tangga tidak semuanya dalam keadaan baik beberapa dalam kondisi rusak berat. Dari informasi yang didapatkan bahwa kendaraan yang dapat beroperasi hanya 1 unit. Kondisi keempat kendaraan operasional sisanya antara lain, satu rusak berat dan tiga lagi dalam tahap perbaikan di bengkel. Maka kondisi ini dapat menghambat perawatan dan pemeliharaan lampu jalan. Artinya Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum bisa semaksimal mungkin mengadakan, merawat dan memelihara prasarana umum, dampaknya mengakibatkan kondisi penerangan jalan umum dalam perawatan dan pemeliharaannya terhambat dan tidak berjalan dengan baik. Keberadaan kendaraan operasional berupa mobil tangga

menjadi sangat dibutuhkan dalam menunjang proses kerja perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum.

Pelaksana kegiatan program perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari tenaga teknis dalam perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum baik pemasangan baru maupun kegiatan perbaikan hal ini masih menjadi permasalahan dalam pencapaian penanganan lampu penerangan jalan umum dikarenakan jumlah tenaga teknis perawatan dan pemeliharaan dari segi jumlah yang belum memadai dengan jumlah titik lokasi lampu penerangan jalan umum sehingga banyak lokasi titik lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru belum tertangani. Selanjutnya adapun data personil teknis pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.7: Data Personil Teknisi pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru

No	Nama	Jumlah personil teknis
1	Teguh	28
Total		48

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun, 2021.

Berdasarkan tabel diatas bahwa tenaga teknis yang ada dilapangan sekarang berjumlah sebanyak 28 orang, sedangkan yang di butuhkan penambahan sebanyak 20 orang personil lagi sehingga pembagian perawatan setiap rayon dapat dibagi rata di masing-masing rayon. Namun dengan jumlah yang ada pada kenyataannya masih jauh dari kurang sehingga dalam perawatan dan pemeliharaan LPJU di Kota Pekanbaru yang terdiri dari lima rayon tidak maksimal dapat ditangani.

Pelaksanaan kegiatan perawatan dan pemeliharaan LPJU di Kota Pekanbaru tidak terlepas dari anggaran yang ditetapkan guna mewujudkan pencapaian perawatan dan pemeliharaan lampu. Adapun anggaran perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum dinilai masih kurang memadai sehingga kegiatan perawatan dan pemeliharaan LPJU belum maksimal dan masih banyak lampu penerang jalan yang rusak. Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU di Kota Pekanbaru berjumlah 18 milyar, namun anggaran yang ada hanya 9 milyar, sehingga pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan LPJU di Kota Pekanbaru masih kurang maksimal, akibatnya banyak lampu jalan yang padam dan rusak.

Pencapaian perawatan dan pemeliharaan LPJU di Kota Pekanbaru masih menjadi suatu permasalahan hal ini dari jumlah pengaduan masyarakat lampu penerangan jalan yang rusak terhadap Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang belum ditangani sehingga menyebabkan jalan umum pada titik lokasi lampu yang disediakan dalam kondisi gelap. Adapun berikut jumlah pengaduan oleh masyarakat Kota Pekanbaru sebagaimana berikut:

Tabel 1.8 : Data Laporan Pengaduan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru 2021.

No	Bulan	Jenis Pengaduan	Jumlah	Kecamatan
1	Januari	PJU Mati Sudah 1 bulan	1 titik	Payung Sekaki

		PJU Mati	2 titik	Sail
		Meteran Terbakar	1 titik	Tampan
		PJU Mati	5 titik	Tampan
		Mati Total	1 titik	Tenayan Raya
		PJU tdk berfugsi	1 titik	Tenayan Raya
		PJU dicabut PLN	1 titik	Tenayan Raya
		PJU Mati	9 titik	Tenayan Raya
		PJU Mati sudah 3 malam	2 titik	Tenayan Raya
		Meteran mati	1 titik	Tenayan Raya
		PJU Mati	2 titik	Tenayan Raya
		PJU Mati	2 titik	Marpoyan Damai
		PJU Mati	16 titik	Tampan
2	Februari	Lampu Mati sudah 3 bulan	1 titik	Tenayan Raya
		Kabel Lampu Jalan Putus	1 titik	Tenayan Raya
		PJU Mati	2 titik	Tenayan Raya
		PJU Mati	2 titik	Tenayan raya
		PJU Mati	2 titik	Tampan
		PJU Mati	12 Titik	Tampan
		PJU Mati	1 titik	Tampan
		PJU Mati	3 titik	Sail
		PJU Mati Semua	1 titik	Sail
		PJU Mati 2 tahun	5 titik	Payung Sekaki
		PJU Mati	5 titik	Sukamaju
3	Maret	PJU Mati	13 titik	Bukit Raya
		PJU Mati	4 titik	Rumbai
		PJU Mati	4 titik	Marpoyan Damai

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

Berdasarkan tabel I.8 diatas Data Laporan Pengaduan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru 2021 pada bulan januari hingga maret. Dimana diketahui masih banyak lampu penerangan jalan umum yang mati dan rusak dan belum adanya tindakan Dinas perhubungan Kota Pekanbaru terkait tanggapan pengaduan masyarakat, kemudian dapat diketahui juga banyaknya lampu penerangan yang mati dan rusak tersebut. Selanjutnya adapun jumlah titik lampu jalan di setiap blok menurut Rayon Kota Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.9: Jumlah Titik Lampu Jalan di Setiap Blok menurut Rayon Kota Pekanbaru.

No	Rayon	Nama jalan	Jumlah titik
1.	Kota Timur	Jl. Parit Indah Pengadilan Agama - Jl. Pesantren	30 Titik
2.	Kota Barat	Jl. Paus - Jl. Arifin Ahmad	20 Titik
3.	Simpang Tiga	Jl. Kartama Inpres - Jl. Kaharudin Nasution	25 Titik
4.	Rumbai	Sri Palas	15 Titik
5.	Panam	Jl. Garuda Sakti Km 1 - Jl. Garuda Sakti Km 2	26 Titik
Total			116 Titik

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 5 titik pengamatan dari 5 titik pengamatan di masing-masing Rayon tersebut, peneliti memfokuskan penelitian hanya pada 3 titik pengamatan di masing-masing Rayon saja, yaitu Rayon Kota Timur penulis memilih satu blok Jl, parit indah pengadilan Agama sampai Jl. Pesantren dengan jumlah 30 titik, kemudian di kota barat penulis memilih satu blok dari Jl. Paus sampai Jl. Arifin Ahmad dengan jumlah 20 titik, dan di Panam penulis memilih satu blok Jl. Garuda sakti Km 1 sampai Garuda sakti Km 2 dengan jumlah 26 titik. Adapun alasan penulis memilih 3 titik Rayon yaitu Rayon kota timur, kota barat dan Panam sebagai lokasi penelitian yaitu dikarenakan pada 3 titik rayon tersebut masih banyak ditemukan permasalahan lampu penerangan jalan umum yang belum maksimal yaitu lampu mati dan rusak di masing-masing 3 titik Rayon.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun beberapa fenomena dan informasi yang peneliti temui dilapangan mengenai pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru antara lain:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang masih kurang memadai dari segi jumlah, diketahui bahwa SDM perawatan dan pemeliharaan LPJU yang di

miliki oleh Dinas Perhubungan kota Pekanbaru sebanyak 28 personil sedangkan beban kerjanya meliputi satu Kota Pekanbaru yang memiliki wilayah yang cukup luas, sehingga dari hasil wawancara mengenai kebutuhan SDM yaitu 48 personil.

2. Anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota untuk perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum masih kurang, sehingga pihak Dinas Perhubungan mengalami keterbatasan kegiatan dan belum mampu melaksanakan perawatan dan pemeliharaan lampu di beberapa lokasi yang rusak dan mati.
3. Sarana dan Prasarana berupa mobil operasional dari segi jumlah tidak memadai, seperti dari 5 unit mobil operasional hanya 1 unit mobil operasional yang dapat beroperasi sehingga mengurangi pencapaian penanganan lampu jalan yang bermasalah.
4. Dari data yang di dapatkan adanya indikasi perawatan lampu jalan yang tidak maksimal terbukti dari banyaknya lampu jalan yang rusak dan mati khususnya terjadi pada beberapa rayon sehingga berdampak pada keluhan dari masyarakat yang tinggi.

Melihat pentingnya pelaksanaan pelayanan umum khususnya perawatan dan pemeliharaan lampu Penerangan jalan umum yang efektif dan efisien agar masyarakat merasa puas, maka diharapkan agar pihak pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum semaksimal mungkin dengan sumber daya yang disediakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah yang dalam penelitian ini adalah “**Bagaimanakah Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru?**”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan tentang administrasi publik yang dipelajari dalam dunia perkuliahan.
- b. Manfaat akademis, sebagai referensi ilmu pengetahuan khususnya bagi penulisan dan umumnya bagi pembaca.
- c. Manfaat praktis, sebagai sumbangan pemikiran terutama bagi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah uraian landasan teori yang menjadi acuan bagi penjelasan masalah penelitian. Tujuan dari tinjauan pustaka adalah mengetahui pola hubungan dan posisi pengetahuan yang telah ada, sehingga memerlukan ulasan terhadap kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian.

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi secara terminologi adalah mengurus, mengatur, atau memenuhi. Siagian (dalam Wirman, 2012:9) menjelaskan administrasi sebagai proses kerja sama antara dua individu atau lebih. Kerja sama ini dilakukan atas dasar rasionalitas untuk mencapai. Menurut Zulkifli (2009:32) administrasi dapat dijelaskan sebagai suatu proses yang dimulai dengan penetapan suatu kebijakan. Selanjutnya, dilakukan kerja sama dari sekelompok orang untuk mencapai sasaran, kebijakan, atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Istilah tujuan yang dimaksud dalam studi administrasi adalah adalah tujuan ideal atau teoritis setiap organisasi, yaitu menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam seluruh bidang organisasi.

Administrasi publik menurut Dwight Waldo (dalam Syafri, 2012:21) adalah organisasi dan tata kelola individu atau hal yang bersifat material untuk mencapai tujuan. Dalam Syafri (2012:3) administrasi publik adalah kegiatan mencatat, mengelola, mengumpulkan, surat-menyurat, pemberian, pengetikan,

penggandaan, penyimpanan, pengarsipan, pengiriman, dan hal lain yang diterima/ dikeluarkan oleh suatu organisasi.

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2009:9) sejumlah pengertian yang dapat menjelaskan lingkup konsep administrasi dirangkum sebagai berikut.

- a. Administrasi berperan sebagai kegiatan terarah untuk memimpin dan mengendalikan organisasi modern menjadi wadah untuk mengurus dan mengusahakan hal-hal di dalam organisasi
- b. Organisasi modern adalah badan dengan konstitusi dan statute yang memiliki arti (*purpose*) tujuan (*goals*), usahanya, sumber pendanaannya (*financial resources*), serta tahapan yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan
- c. Setiap organisasi modern memiliki pemimpin yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memimpin serta orang-orang yang dipimpin (seperti administrator)
- d. Administrator adalah individu atau dewan.
- e. Administrator melakukan tugas wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabannya dalam proses yang disebut administrasi.

Menurut Leonard D.White (dalam Syafie, 2011:3) administrasi dijelaskan sebagai susunan kegiatan untuk menata pekerjaan atau tugas pokok oleh kelompok yang bekerja sama untuk tujuan yang sama. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa administrasi adalah proses kerja sama antara dua individu atau lebih untuk tujuan yang telah ditentukan. Administrasi memiliki arti bahwa pelaksanaannya

dilakukan oleh satu pihak, tetapi memerlukan kerjasama dengan pihak lain dalam pencapaian tujuan tertentu.

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Organisasi adalah elemen utama bagi suatu kelompok yang bekerja sama. Organisasi menjadi perhimpunan untuk kelompok melakukan pembagian tugas dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi berperan sebagai wadah berupa struktur kotak yang menggambarkan hierarki, kedudukan individu, kelompok orang, kelompok pekerjaan, serta model hubungan antar departemen atau unit yang dibentuk. Pengorganisasian adalah proses yang mewakilkan kegiatan yang sedang berlangsung dari sekelompok individu dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2009:24) secara dinamis, organisasi adalah proses pendefinisian dan pengalokasian pekerjaan yang harus dilakukan, pemberian tugas, tanggung jawab, kewenangan dan hubungan antar elemennn organisasi untuk kerja sama secara efektif mencapai target atau sasaran. Sedangkan menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah menggabungkan pekerjaan individu atau kelompok dengan bakat yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Caranya adalah menyediakan sarana untuk penggunaan upaya yang efektif, sistematis, dan positif dari sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dari organisasi.

Organisasi menurut Siagian (dalam Tarmizi dan Andry, 2015:14) adalah perkumpulan dua individu atau lebih, bekerja sama secara formal dengan tujuan tertentu. Organisasi memiliki ikatan dimana satu orang atau lebih disebut atasan dan sejumlah orang lainnya dikategorikan dalam bawahan. Menurut Richard Scott

organisasi secara kolektif sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu dengan dasar prinsip kesinambungan (dalam Thoha, 2008;168). Menurut Siagian (2008;96) organisasi adalah tempat kegiatan manajemen dan administrasi berlangsung. Selanjutnya, organisasi sebagai sebuah proses fokus kepada interaksi antara seluruh orang yang berada dalam organisasi. Menurut Zulkifli (2005;131) yang mengatakan bahwa organisasi dalam berbagai bentuk atau jenis adalah sistem yang bersifat dinamis dan terbuka. Sifat yang terbuka ini akan terdapat banyak pengaruh perubahan yang muncul dari aspek lingkungan eksternal.

Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik adalah wadah dengan berbagai peran, seperti bertujuan menyediakan, memenuhi, sekaligus memberikan kepuasan berbagai pihak. Sementara itu, Stephen P. Robbins (dalam Fahmi, 2013:2) menjelaskan bahwa organisasi publik adalah unit sosial dengan koordinasi secara sadar. Organisasi publik memiliki batasan yang umumnya dapat dikenali. Organisasi relative berjalan terus menerus untuk mencapai tujuan. Definisi organisasi publik berkaitan dengan proses pengorganisasian. Berdasarkan yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah wadah atau sistem yang saling mempengaruhi antara individu dalam suatu kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Manajemen berasal dari kata kerja (*to manage*) yang berarti menangani, mengendalikan, menguasai, mengurus, dan menyelesaikan sesuatu. Dalam manajemen dikenal istilah manajer, yaitu seseorang yang diberikan tugas memimpin dan mengelola suatu tugas, lembaga, usaha, dan sebagainya. Menurut

Manullang (2006:10) manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Siagian (2003:47) mendefinisikan manajemen dari dua perspektif. Pertama, manajemen sebagai metode penyusunan kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kedua, manajemen adalah kemampuan individu dalam kepemimpinan untuk mencapai hasil dalam mencapai tujuan melalui kegiatan orang lain. Siswanto (2005:2) menjelaskan manajemen adalah seni dan ilmu dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, memberi motivasi, dan mengendalikan individu serta mekanisme kerja untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, menurut Hasibuan (2001:2) manajemen adalah ilmu sekaligus seni untuk menyelenggarakan prosedur pemanfaatan berbagai sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan. Manajemen terdiri dari 6 unsur (6M) yaitu: *Man, Money, Methode, Machines, Materials, dan Market*.

Menurut Siagian (dalam Hendry Andry, 2015;12) manajemen diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki untuk memperoleh hasil dari tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan orang lain. Sedangkan pengertian manajemen publik menurut Steven Ott, et.al. (dalam Pasalong, 2010;83) adalah mengalami masa transisi dengan beberapa isu seperti, (a) privatisasi sebagai satu alternatif bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik; (b) rasionalitas dan akuntabilitas; dan (c) perencanaan dan kontrol. Selain itu, manajemen publik oleh Shafritz dan Russel (dalam Keban, 2008:93) adalah upaya individu dalam pengelolaan

organisasi. Manajemen turut meliputi pengelolaan dan penggunaan sejumlah sumber daya (manusia, mesin, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003:2) kegiatan pemerintah untuk menangani masalah dalam masyarakat disebut dengan kebijakan publik. Penanganan masalah ini dilakukan secara langsung oleh pemerintah atau melalui lembaga terkait. Dalam Nugroho (2003:7) disebutkan bahwa kebijakan merupakan sebagai aturan dalam hidup berdampingan satu sama lain. Kebijakan sebagai aturan wajib dipatuhi oleh semua orang. *Policy making process* menjadi proses penetapan kebijakan yang meliputi beberapa hal berikut (Shafrits dan Russel dalam Keban, 2004:63):

1. Membuat agenda untuk mengidentifikasi isu dalam kebijakan
2. Membuat keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan kebijakan,
3. Melakukan tahap implementasi kebijakan,
4. Melakukan evaluasi program dan analisa dampak,
5. *Feedback* yaitu memutuskan untuk merevisi atau menghentikan kebijakan

Kebijakan publik menjadi jalan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Program kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Didalam penjelasan menurut Nugroho, Edwards III, dan Sharkansky (dalam Hariyoso 2002:62) kebijakan publik adalah pernyataan yang dipilih melalui tindakan pemerintah berupa tujuan dan program tertentu. Menurut Thomas R. Dye (dalam Sumaryadi, 2005:19) kebijaksanaan negara adalah segala bentuk tindakan yang diputuskan oleh pemertintah untuk digunakan atau tidak

digunakan. Dari dua pernyataan ahli tersebut disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan kekuatan pemerintah untuk melakukan tindakan yang bertujuan untuk membuat sebuah keputusan atau program dimana program tersebut mempunyai tujuan untuk masyarakat.

Sedangkan menurut Nugroho (2006:25) kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur aktivitas masyarakat secara keseluruhan, bukan secara individual atau kelompok tertentu. Dengan demikian, terdapat empat kegiatan pokok dalam kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan perumusan terhadap kebijakan
2. Melakukan implementasi kebijakan
3. Melakukan evaluasi kebijakan
4. Melakukan revisi kebijakan (sekalius menjadi perumusan kembali dari kebijakan)

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa proses penetapan kebijakan melalui beberapa tahapan, dimana dari tahapan tersebut nantinya kebijakan yang dibuat diharapkan dapat memberikan dampak yang besar kepada masyarakat. Dengan tahapan-tahapan tersebut proses pembuatan kebijakan dapat terlihat matang atau tidaknya.

Kebijakan memiliki manfaat untuk menyediakan anjuran bagi proses pengambilan keputusan kebijakan berikutnya. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang akan datang tidak mengulangi kesalahan pada kebijakan sebelumnya. Arikunto dan Cepi (dalam Afifudin, 2013;251) menjelaskan bahwa terdapat evaluasi merupakan kegiatan menganalisis informasi suatu kebijakan yang sedang

berjalan, kemudian informasi yang didapatkan digunakan untuk menentukan substitusi lain yang tepat dalam memutuskan suatu kebijakan.

Menurut Subarsono (2005;123) evaluasi kebijakan publik dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut ini. Evaluasi kebijakan publik dapat berfungsi mengukur efektifitas suatu kebijakan. Selanjutnya, dapat dianalisis mengenai keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan publik memenuhi aspek akuntabilitas, menunjukkan pada pemangku kepentingan mengenai manfaat kebijakan. Kemudian mengadakan evaluasi untuk menetapkan kebijakan yang lebih baik tanpa mengulangi kesalahan pada kebijakan sebelumnya.

Merujuk pada pendapat Riant Nugroho (2003:185) berkaitan dengan perumusan, implementasi, dan lingkungan kebijakan publik. Winarno (dalam Riant Nugroho, 2003;154) menjelaskan kebijakan publik kerap dipahami hanya sebatas evaluasi implementasi kebijakan, tetapi sebenarnya evaluasi kebijakan publik melingkupi tiga makna, yaitu evaluasi perumusan kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan, dan evaluasi lingkungan kebijakan. Hal tersebut menjadi makna yang menentukan sejauh mana keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Menurut Nurcholis (2005;169) evaluasi kebijakan dapat menjadi proses yang mendasarkan diri pada kedisiplinan dan waktu. Dengan evaluasi, dapat diketahui keluaran dari kegiatan atau program. Pelaksanaan evaluasi berguna untuk melakukan analisis permasalahan yang ada. Nurcholis (2007:277) menyebutkan beberapa aspek umum dalam penilaian evaluasi program yang meliputi *input*, *proses*, *output*, dan *outcome*. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. *Input*, yaitu informasi berupa masukan untuk pelaksanaan kebijakan. Masukan ini berdasarkan indikator sumber daya dan bahan dasar pendukung.
2. *Proses*, bentuk perwujudan kebijakan melalui pelayanan masyarakat. Proses ini berdasarkan indikator tepat sasaran, tepat guna, dan efisiensi.
3. *Output*, yaitu keluaran pelaksanaan kebijakan. Hasil ini berdasarkan dengan indikator sasaran yang tepat, besaran sasaran yang tercakupi, jumlah kelompok sasaran yang dapat ditangani, dan jumlah kelompok yang terlibat
4. *Outcome*, yaitu mengenai dampak pelaksanaan kebijakan terhadap kelompok sasaran. Indikatornya adalah sejauh mana perubahan yang terjadi, seberapa besar perubahan kelompok sasaran, seberapa signifikan perubahan yang terjadi pada kelompok sasaran, khususnya jika dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Evaluasi kebijakan berkaitan dengan pengaplikasian beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program (Dunn, 2003:608). Istilah evaluasi berhubungan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian usaha. Evaluasi berkaitan dengan informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya kriteria evaluasi kebijakan dijelaskan oleh Dunn (2003:610) adalah berikut ini.

1. Efektifitas, yaitu mengenai keberhasilan yang dicapai
2. Efisiensi, yaitu mengenai usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan
3. Kecukupan, yaitu penyelesaian masalah yang dicapai
4. Pemerataan, yaitu mengenai biaya yang tersedia dimanfaatkan dan didistribusikan secara merata
5. Responsivitas, yaitu mengenai kepuasan hasil kebijakan terhadap kebutuhan, profesi, dan nilai kelompok
6. Ketetapan, yaitu mengenai nilai dan kegunaan dari hasil yang dicapai

Menurut Siagian (2002:147) evaluasi menjadi kegiatan untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dengan kenyataan yang diperoleh. Melalui evaluasi dapat dilihat sejauh mana hasil yang dicapai melampaui sasaran, sama dengan yang diharapkan, atau kurang dari target. Evaluasi adalah sebuah penilaian sistematis untuk mengukur efisiensi program. Dari evaluasi dapat

diperoleh informasi untuk memaksimalkan hasil kebijakan selanjutnya. Evaluasi turut digunakan untuk mencapai tujuan dari program pencapaian hasil atau efektifitas, serta kesesuaian program kebijakan, dan kebutuhan masyarakat.

5. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Setiawan (2004:71) implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya, serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Menurut pendapat Nurdin Usman (2002:79), implementasi bukan sekedar aktivitas, melainkan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan. Wahab (2004:72) menjelaskan implementasi sebagai pemahaman hal yang terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku. Pelaksanaan implementasi kebijakan berfokus pada adalah peristiwa setelah kebijaksanaan dinyatakan sah, sekaligus mencakup administrasi, dampak pada masyarakat, dan kejadian lainnya.

Awang (2010:78) menjelaskan bahwa implementasi adalah pemahaman tentang apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu program dinyatakan efektif atau dibangun. Hal yang menjadi fokus perhatian pada implementasi kebijakan adalah peristiwa yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan. Implementasi menjadi pedoman bagi upaya pengelolaan program, dampak konkrit program terhadap masyarakat, atau berbagai peristiwa yang terjadi. Maka, dari sejumlah definisi di atas implementasi diartikan sebagai proses, aksi, atau aktivitas yang didasarkan pada hasil keputusan yang telah disepakati untuk dilaksanakan. Implementasi cenderung pada sisi kebijakan, yaitu penerapan kebijakan umum.

Menurut Nugroho (2012:67) implementasi suatu kebijakan merupakan sarana yang dengannya suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak banyak, tidak kurang. Untuk melaksanakan suatu implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan.

Implementasi secara langsung sebagai program maupun melalui perumusan kebijakan yang berasal dari atau turunan dari kebijakan publik. Sejumlah teori implementasi suatu kebijakan antara lain menurut George Edward III (1984:9-10), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi/sikap, dan struktur birokrasi.

Menurut Winarno (2012:187) implementasi kebijakan publik adalah upaya pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok pemerintah, yaitu pelayanan publik. Menurut Wibawa, (2011:7) implementasi kebijakan adalah pengambilan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar. Implementasi kebijakan dituangkan dalam undang-undang tertentu, tetapi implementasi kebijakan dapat berupa arahan eksekutif atau keputusan perundangan. Merujuk pada Van Meter dan Van Horn (dalam Leo Agustino, 2012:139) implementasi kebijakan adalah aksi atau tindakan pemerintah, pejabat, atau pihak swasta dalam mencapai tujuan dalam keputusan kebijakan.

Model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Warwick (1979) adalah "*Transactional Model*". Model ini mengasumsikan bahwa untuk memahami permasalahan dalam tahap implementasi rencana atau kebijakan, individu tidak boleh mengabaikan hubungan antara perencanaan dan implementasi. Proses perencanaan tidak terpisah dengan pelaksanaannya. Dalam tahapan implementasi, kekuatan yang berbeda akan memberikan pengaruh berupa faktor yang mendorong atau memfasilitasi. Selain itu, terdapat pula kekuatan yang dapat menghambat atau menunda pelaksanaan yang direncanakan. Dalam konteks ini, Menurut Warwick(dalam Tachjan ,2008:43) menjelaskan:

1. Tahap Perencanaan, memerlukan kemampuan berikut, (a) staf perencanaan, (b) kemampuan organisasi perencanaan, (c) teknik analisis, (d) mutu informasi yang dibutuhkan.

2. Tahap implementasi program dan proyek pembangunan, melibatkan dua kategori faktor, yaitu sebagai berikut.
 - a) Faktor pendorong, terdiri dari: (1) komitmen pimpinan politis, (2) kapasitas organisasi, (3) komitmen implementasi, dan (4) dukungan dari pemangku kepentingan.
 - b) Faktor penghambat, terdiri dari (1) jumlah orang yang terlibat, (2) komitmen atau loyalitas ganda; (3) kerumitan (4) jumlah jenjang pengambilan keputusan yang banyak, (4) waktu dan kepemimpinan.

Berdasarkan uraian di atas, implementasi kebijakan adalah pengambilan keputusan kebijakan yang mendasar. Implementasi kebijakan tertuang dalam undang-undang, tetapi dapat juga berupa arahan, keputusan eksekutif yang penting, dan strategi atau program yang perlu dipersiapkan pada aspek-aspek tertentu, seperti tahap perencanaan dan pelaksanaan program.

6. Konsep Perawatan dan Pemeliharaan

Menurut Ahmadi dkk (2017) perawatan adalah kegiatan menjaga, memelihara, atau memperbaiki suatu fasilitas yang memerlukan perbaikan, penyesuaian, atau penggantian secara berkala. Tujuan perawatan adalah agar suatu instalasi, fasilitas, atau produk dapat beroperasi sesuai dengan fungsi dan perencanaannya. Kegiatan perawatan dilakukan juga bertujuan untuk memelihara dan memperbaiki suatu peralatan agar dapat berguna secara efektif dan efisien, sehingga mencapai hasil kualitas produk yang baik.

Perawatan adalah cara memelihara sesuatu agar tidak rusak dengan perawatan secara berkala dan teratur (Jono, 2006). Perawatan mmenjadi kegiatan merawat fasilitas agar peralatan selalu siap digunakan pada saat dibutuhkan, sekaligus menjadi fungsi utama dalam organisasi (Widyasputri, 2010). Sejumlah faktor dapat menjadi penyebab kegagalan mesin, seperti keausan (*wear out*), korosi

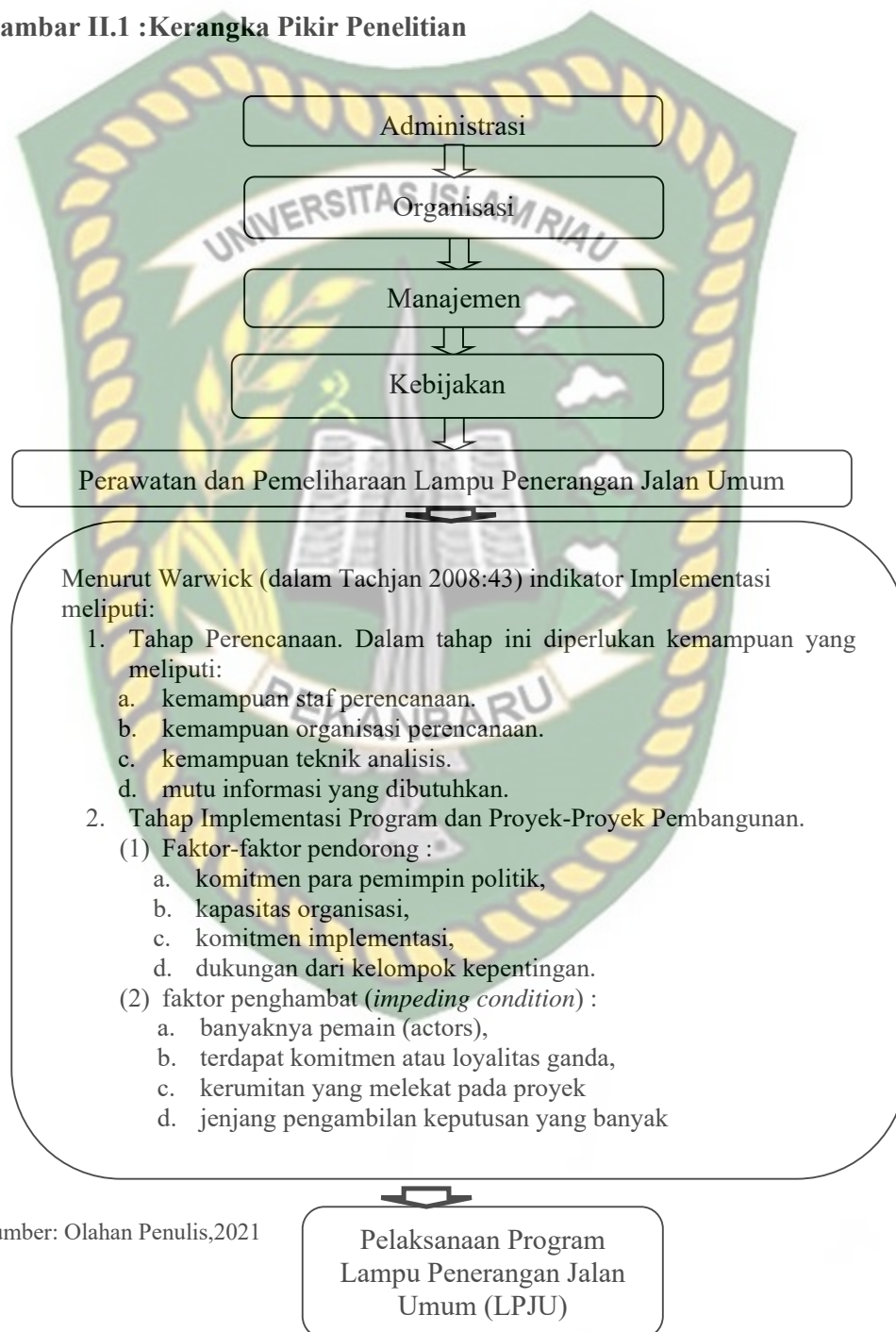
(*corrosion*) dan kelelahan (*fatigue*) (Widyasputri, 2010). Pada dasarnya perawatan bertujuan menjaga produk dalam kondisi baik, sehingga siap pakai dan bertahan lama (Jono, 2015). Perawatan secara berkala diperlukan untuk mengganti peralatan yang rusak dengan sumber daya yang ada. Sistem dapat kembali seperti semula jika dilakukan perawatan dengan baik, sehingga memperpanjang umur manfaat mesin dan meminimalkan kerusakan. Manajemen perawatan berperan dalam mengembangkan kebijakan bagi perawatan dengan mempertimbangkan hal-hal teknis. Semakin besar aktivitas perbaikan sistem, semakin besar kebutuhan manajemen dan pengontrolan pemeliharaan (Kusnadi, 2016).

Pemeliharaan dilakukan secara berkala atau disebut dengan pemeliharaan terjadwal. Pemeliharaan dapat menghindari gangguan atau disebut dengan pemeliharaan pencegahan. Dengan demikian, MRO didefinisikan sebagai seluruh tindakan yang dimaksudkan untuk memelihara atau mengembalikan suatu komponen atau mesin dalam keadaan ideal, sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan perusahaan. Tindakan yang dilakukan adalah integrasi manajerial teknis, administratif, dan pengawasan (Ngadiyono, 2010).

B. Kerangka Pikir

Berikut ini adalah kerangka pikiran yang menggambarkan keterkaitan antara variabel penelitian melalui sejumlah indikator.

Gambar II.1 :Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: Olahan Penulis,2021

Pelaksanaan Program
Lampu Penerangan Jalan
Umum (LPJU)

C. Konsep Operasional

Berikut ini adalah pemaparan sejumlah konsep yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bentuk operasional dengan tujuan untuk menghindari kekeliruan dalam penggunaan beberapa istilah.

1. Administrasi adalah kegiatan untuk mencapai tujuan dengan dimulai dari proses pemikiran, pelaksanaan, hingga pencapaian tujuan.
2. Administrasi publik adalah tata kelola sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan pemerintah.
3. Organisasi adalah individu atau kelompok dalam organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan yang dimiliki organisasi adalah tujuan umum dan spesifik yang dicapai dengan norma aturan bagi seluruh anggota organisasi.
4. Organisasi publik adalah organisasi untuk mewartakan masyarakat dalam negara dengan kewenangan yang terlegitimasi di bidang politik, administrasi pemerintahan, dan hukum, sehingga mempunyai kewajiban melindungi warga, memberikan pelayanan, memungut pajak untuk pendanaan, dan menjatuhkan hukuman sebagai sanksi.
5. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi secara bersama-sama.
6. Manajemen publik adalah usaha pihak yang bertanggung jawab menjalankan organisasi dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) untuk meraih tujuan.
7. Kebijakan adalah suatu tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah mengenai hambatan tertentu, selanjutnya mencari peluang untuk menyelesaikan masalah serta mencapai tujuan tertentu.
8. Perawatan adalah kegiatan berkala dalam pergantian kerusakan peralatan dengan sumberdaya yang tersedia.

9. Pemeliharaan adalah kegiatan berkala menjaga perangkat (dikenal sebagai pemeliharaan terjadwal) atau mencegah timbulnya gangguan (pemeliharaan pencegahan).
10. *Output*, yaitu keluaran pelaksanaan kebijakan. Hasil ini berdasarkan dengan indikator sasaran yang tepat, besaran sasaran yang tercakupi, jumlah kelompok sasaran yang dapat ditangani, dan jumlah kelompok yang terlibat
11. Tahap Perencanaan merupakan fase atau tingkatan awal dari penetapan suatu program atau kegiatan, dalam tingkat ini seluruh informasi yang di butuhkan untuk pembuatan strategi dan tujuan di kumpulkan dan di tetapkan.
12. Kemampuan staf perencanaan ialah tingkat pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh personil, pegawai yang ikut dalam merencanakan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
13. Kemampuan organisasi perencanaan merupakan pengetahuan, keahlian dan keterampilan atau kapabilitas dan reputasi yang dimiliki organisasi yang akan melaksanakan program dan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
14. Kemampuan teknik analisis adalah tingkat keahlian dan keterampilan tim perumus strategi dan program dalam mengumpulkan informasi kebutuhan dan prioritas tindakan yang akan di putuskan dan di laksanakan.
15. Mutu informasi yang dibutuhkan ialah kualitas kebenaran informasi yang di jadikan dasar pembuatan strategi dan program Penerangan Jalan Umum (PJU) oleh organisasi pelaksana.
16. Komitmen para pemimpin politik, ialah keseriusan dari pelaksana baik pimpinan pemerintahan secara politik dan struktural.
17. Kapasitas organisasi ialah kemampuan atau kapabilitas organisasi yang melaksanakan program dan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).

18. Komitmen implementasi ialah bentuk komitmen keseriusan dan profesionalisme pelaksana program dan kegiatan dalam melaksanakan program perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru.
19. Dukungan dari kelompok kepentingan ialah bantuan baik secara perencanaan dan teknis mengenai program perawatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU).
20. Pemain (*actors*) ialah pelaksana program perawatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan hingga evaluasi program.
21. Kerumitan yang melekat pada proyek ialah faktor yang menghambat program perawatan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) baik pada sisi SDM maupun sarana dan prasarana
22. Jenjang pengambilan keputusan yang banyak ialah sebuah sistem yang akan menghambat keterlaksanaan program Penerangan Jalan Umum (PJU) jika SDM sulit menentukan sumber perintah dalam arahan pekerja
23. Waktu dan perubahan kepemimpinan adalah lama atau cepatnya SDM dalam memimpin, membina atau melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya.

D. Operasional Variabel

Table II.1 : Operasional Variabel Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Item
Proses perencanaan tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang terpisah dengan pelaksanaan. Pada tahap implementasi, berbagai kekuatan akan berpengaruh baik faktor yang mendorong atau mempelancar, maupun kekuatan yang menghambat atau memacetkan pelaksanaan program. Warwick (dalam Tachjan2008;43)	Analisis Pelaksanaan Program Perawatan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru	Tahap Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan staf perencanaan, 2. Kemampuan organisasi perencanaan, 3. Kemampuan teknik analisis, 4. Mutu in-formasi yang dibutuhkan
		Tahap Implementasi Program dan Proyek-Proyek Pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. faktor pendorong (facilitating condition), <ol style="list-style-type: none"> (a) komitmen para pemimpin politik. (b) kapasitas organisasi. (c) komitmen implementasi. (d) dukungan 2. faktor penghambat (impeding condition). <ol style="list-style-type: none"> (a) banyaknya pemain (actors). (b) terdapat komitmen atau loyalitas ganda. (c) kerumitan yang melekat pada proyek (d) jenjang pengambilan keputusan yang banyak (e) waktu dan perubahan kepemimpinan

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode survei. Menurut Sugiyono (2012:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk melakukan generalisasi. Berdasarkan gambaran keadaan, masalah, dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya, maka pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah penelitian survei. Pada penelitian ini, survei dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan. Oleh karena itu, penelitian survei adalah studi yang mengambil sampel dari setiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan data yang utama. Peneliti menyusun daftar pertanyaan wawancara mengenai topik penelitian untuk dibagikan kepada informan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan lokasi penelitian hanya pada 3 titik pengamatan di masing-masing Rayon saja, yaitu Rayon Kota Timur penulis memilih satu blok Jl, parit indah pengadilan Agama – Jl. Pesantren dengan jumlah titik 30, di kota barat penulis memilih satu blok dari Jl .Paus sampai Jl. Arifin Ahmad dengan jumlah titik 20 titik dan di Panam Penulis memilih satu blok Jl. Garuda sakti Km 1 sampai Garuda sakti Km 2 dengan jumlah titik 26 titik. Adapun alasan memilih lokasi penelitian ini dikarenakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di 3 titik rayon tersebut belum

maksimal, dimana jumlah Lampu Penerangan Jalan yang Rusak dan Mati angkanya cukup tinggi dan luasnya wilayah kerja di 3 titik Rayon tidak di barengi dengan jumlah sumber daya manusia dalam Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang memadai, sehingga pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru belum maksimal.

C. Key Informan dan Informan

Key informan adalah informan yang memiliki pengetahuan dan latar belakang informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah sejumlah pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Suryanto 2005:171). Terdapat keterbatasan untuk mengumpulkan data dari seluruh pihak yang terkait, maka dalam penelitian ini dipilih beberapa informan yang relevan untuk memberikan informasi berdasarkan pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini, jumlah informan tidaklah terbatas pada informan yang akan ditetapkan selanjutnya. Informan yang terlibat didalam penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel III.1 : Key Informan dan Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	1 orang
2.	Kepala Sub Bagian Program	1 orang
3.	Kepala Bidang KTSP	1 orang
4.	Seksi Penerangan Jalan Umum	1 orang
5.	Mandor	1 orang
6	Teknisi	1 orang
7.	Anggota DPRD Kota Pekanbaru	2 orang
8.	Masyarakat	4 orang
Jumlah		12 orang

Sumber: Olahan Data Penelitian, 2021

Berdasarkan tabel diatas Key Informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Kasubag Program, Kepala Bidang KTSP, Seksi Penerangan Jalan Umum, Mandor, Tenaga Teknisi, Anggota DPRD Kota Pekanbaru. Sedangkan Informan pada penelitian ini merupakan Kadis Dinas Perhubungan, dan Masyarakat di 3 titik rayon sebanyak 4 orang.

D. Teknik Penarikan Informan

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan Key Informan dan Informan, maka untuk menentukan informan pada Kepala Dinas menggunakan teknik total sampling. Total sampling adalah penarikan sampel secara keseluruhan. Kepala Sub Bagian Program, Kepala Bidang KTSP, Seksi Penerangan Jalan Umum, Mandor, Teknisi dan Anggota DPRD Kota Pekanbaru serta Masyarakat menggunakan teknik Teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tertentu dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelusuri situasi yang diteliti.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah menggali informasi dengan menanyakan tujuan data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi analisis pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa Data Lampu Penerangan Jalan, Peraturan Daerah, Undang-Undang, buku-buku pendukung, jurnal, laporan penelitian yang telah ada yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan keterangan yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Wawancara (*interview*), yakni dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, guna memperoleh data primer. Melalui wawancara terhadap Kadis Dinas Perhubungan, Kepala Bidang Program, Kepala seksi Penerangan Jalan, Mandor, Tenaga Teknisi, DPRD Kota Pekanbaru, dan Masyarakat di 3 titik Rayon Kota Pekanbaru.
2. Observasi (*observation*) adalah pengamatan langsung yang dilakukan penelitian ke lapangan untuk mengetahui secara nyata mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.
3. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dokumen-dokumen atau arsip yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah triangulasi sebagai bagian dari pengolahan data kualitatif. Menurut Sugiyono (2011:98) triangulasi adalah teknik menggabungkan sejumlah metode pengumpulan data dan sumber data yang telah tersedia. Pengelolaan data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pengelolaan data dimulai dengan perumusan masalah dan interpretasi, sebelum terjun ke lapangan dan berlanjut hingga penulisan hasil penelitian. Pengolahan data fokus selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Selanjutnya, data diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Analisis data hasil penelitian dilakukan dengan metode deskriptif, sehingga dapat menganalisis pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di Kota Pekanbaru.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Berikut adalah tabel jadwal pelaksanaan penelitian:

Tabel III.2: Jadwal Kegiatan Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2021																				
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi Kuisisioner																					
5	Rekomendasi Survey																					
6	Survey Lapangan																					
7	Analisis Data																					
8	Penyusunan																					
9	Revisi Skripsi																					
10	Ujian																					
11	Revisi Skripsi																					
12	Penggandaan Skripsi																					

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2021.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Singkat Kota Pekanbaru

Perkembangan kota Pekanbaru erat dengan fungsi [Sungai Siak](#) sebagai sarana transportasi untuk distribusi hasil pertanian dari pedalaman dan dataran tinggi [Minangkabau](#) ke wilayah pesisir [Selat Malaka](#). Tercatat bahwa sekitar abad ke-18, Kawasan Senapelan di tepi Sungai Siak menjadi pasar (*pekan*) bagi [pedagang yang datang dari dataran tinggi Minangkabau](#). Kawasan tersebut selanjutnya berkembang menjadi kawasan pemukiman penduduk. Pada [23 Juni 1784](#), hasil musyawarah "Dewan Menteri" [Kesultanan Siak](#) yang terdiri dari [datuk](#) empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar) menamai kawasan ini dengan Pekanbaru. Hari hasil musyawarah tersebut sekaligus menjadi hari peringatan hari jadi kota Pekanbaru.

Pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau. Sejarah menceritakan bahwa terdapat dusun bernama payung sekaki di tepi sungai Siak. Semasa pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi *Gun* yang digunakan oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Pemerintahan Republik Indonesia selanjutnya melalui ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946 mengubah status menjadi *Hermente* Pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal [19 Oktober 1919](#), Pekanbaru menjadi bagian [distrik](#) dari [Kesultanan Siak](#). Selanjutnya, pada tahun [1931](#), terjadi perubahan dimana Pekanbaru termasuk dalam wilayah [Kampar Kiri](#). Pada saat itu, Pekanbaru dipimpin oleh *controleur*

yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun [1940](#). Selanjutnya hingga tahun 1942, Pekanbaru menjadi ibu kota *Onderafdeling Kampar Kiri*. Setelah pendudukan [Jepang](#) pada tanggal [8 Maret 1942](#), Pekanbaru dipimpin oleh gubernur militer yang dikenal dengan istilah *gokung*. (<http://wikipedia.Indonesia.com.Pekanbaru>)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru semula adalah 62,96 Km, terdapat 8 Kecamatan, dan 36 Kelurahan. Pembagian ini berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 sejumlah kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan, seperti Kecamatan Payung Sekaki, kecamatan Tenayan Raya, dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km².

B. Profil Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Misi yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah melaksanakan pekerjaan pemerintah daerah di bidang transportasi dan melaksanakan wewenang dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh pemerintah dalam kerangka desentralisasi. Sektor transportasi memiliki kontribusi yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan karena sifatnya sebagai lokomotif, mesin kegiatan pembangunan, dan perekat kesenjangan antar wilayah. Sejumlah visi dan misi Pelayanan Transit Kota Pekanbaru adalah mencapai tingkat kualitas pelayanan

dan memberikan pelayanan transportasi yang komprehensif, komprehensif, handal dan terjangkau.

Berikut ini adalah sejumlah tugas Dinas Lalu Lintas dan Komunikasi Kota Pekanbaru:

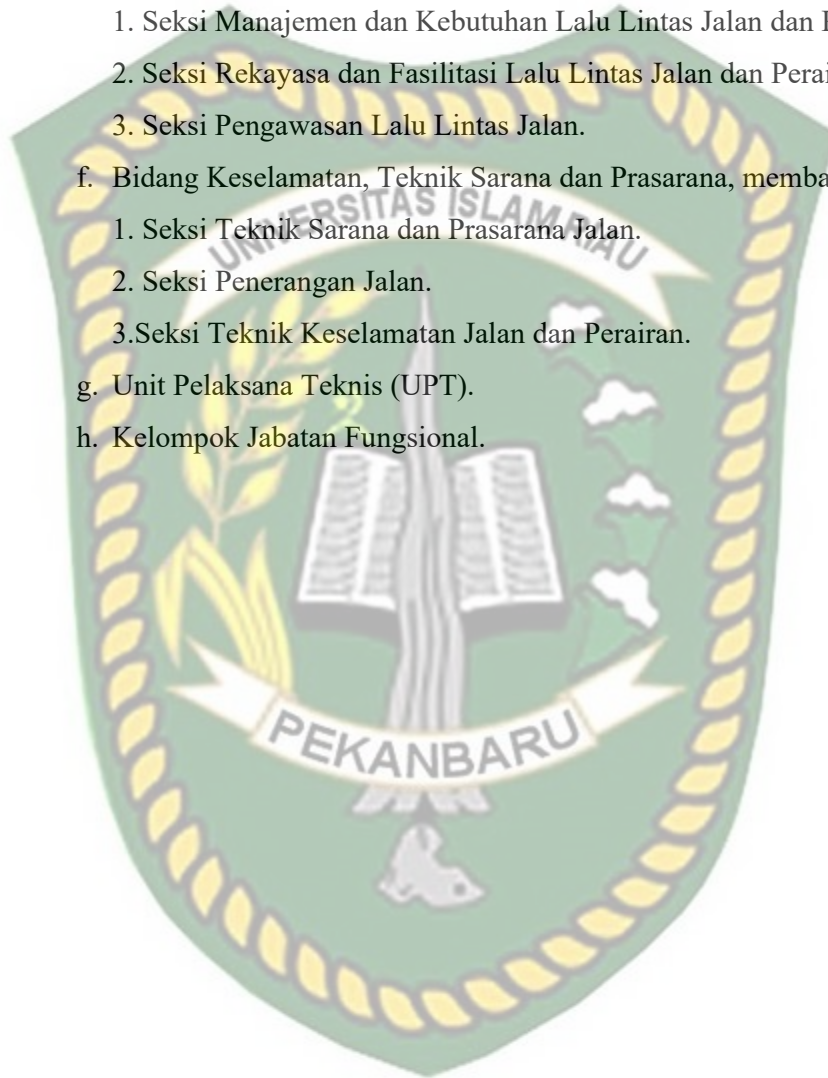
1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional;
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan;
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi;
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan

C. Struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Struktur organisasi ialah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Adapun susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai berikut:

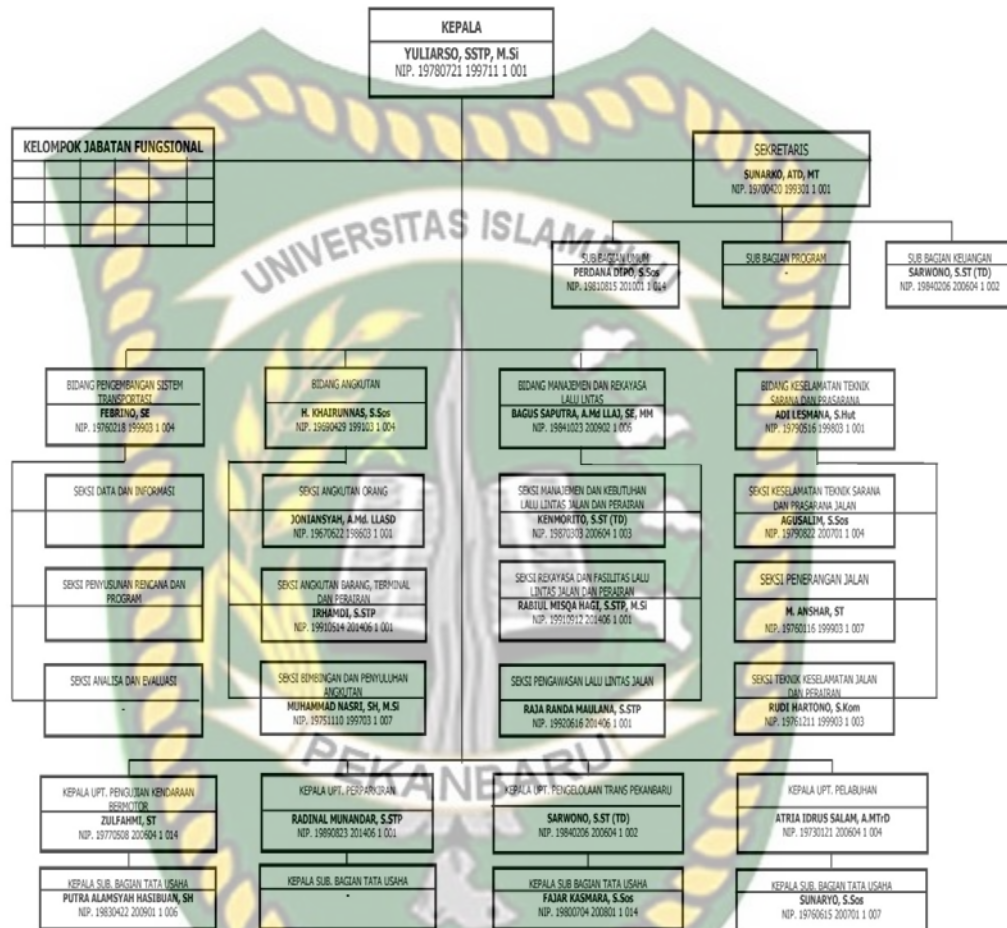
- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretaris, membawahi
 1. sub bagian umum.
 - 2 sub bagian program.
 3. sub bagian keuangan.
- c. Bidang pengembangan sistem transportasi, membawahi
 1. Seksi Data dan Informasi.
 2. Seksi Penyusunan Rencana dan Program.
 3. Seksi Analisa dan Evaluasi
- d. Bidang Angkutan, membawahi

1. Seksi Angkutan Orang.
 2. Seksi Angkutan Barang Terminal dan Perairan.
 3. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Angkutan.
- e. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, membawahi
1. Seksi Manajemen dan Kebutuhan Lalu Lintas Jalan dan Perairan.
 2. Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas Jalan dan Perairan.
 3. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Jalan.
- f. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi
1. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Jalan.
 2. Seksi Penerangan Jalan.
 3. Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Selanjutnya untuk lebih jelas mengenai struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar. IV. Struktur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2021

D. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

1. Kepala Dinas

Tugas kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru meliputi otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi, pembantuan perhubungan, dan tugas lain dari walikota dan kepala daerah, sebagai berikut ini:

1. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, sesuai undang-undang
2. Mengkoordinasi kerja sama Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT
3. Memberikan arahan kepada bawahan untuk dalam pelaksanaan tugas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan
4. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
5. Mengevaluasi hasil kerja sesuai rencana yang telah ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir
6. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku
7. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan.

2. Sekretaris

Sekretaris berkedudukan dibawah kepala dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tugas sebagai berikut:

1. Memimpin dan menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan penyusunan program dinas;
2. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan;
3. Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas;
4. Mewakili Kepala Dinas yang berhalangan atau tidak berada di tempat;
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian;
6. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas;
9. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
11. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut
12. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis
13. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selain itu, masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepa Sekretaris.

3. Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan memiliki sejumlah tugas yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di bidang angkutan;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tatalaksana administrasi bidang angkutan;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di bidang angkutan;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta pengaturan kinerja bidang angkutan;

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang angkutan;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Masing – masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan.

4. Bidang Pengembangan Sistem Transportasi

Bidang Pengembangan Sistem Transportasi bertugas membantu melaksanakan, mengkoordinasikan, merumuskan pelaksanaan kegiatan dinas, musyawarah perencanaan pembangunan dan dokumen usulan pembangunan sarana dan prasarana serta penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) dan Rencana Kerja (RENJA). Bidang Pengembangan Sistem Transportasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengoordinasian, penyiapan rencana program kegiatan dan penyusunan dokumen pengadaaan, perencanaan usulan pembangunan sarana dan prasarana transportasi dinas.
2. Pengoordinasian, perumusan dan penyiapan rencana pemeliharaan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi serta pengembangan jaringan transportasi.
3. Pengoordinasian, perumusan dan penyiapan bahan penelitian dan evaluasi pengembangan transportasi.
4. Pengoordinasian dan penyusunan laporan tahunan, laporan pelanggaran pemerintah daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban.
5. Pengoordinasian dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penelaahan dan evaluasi dokumen teknis pembangunan infrastruktur transportasi.

6. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perhubungan.
7. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bidang.
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

5. Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas bertugas menyiapkan perencanaan pengaturan lalu lintas, kebutuhan, pengadaan, penempatan, dan pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional di ibukota kabupaten.

Fungsi bidang ini adalah sebagai berikut:

1. Menyusun program dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di seksi manajemen rekayasa dan sarana prasarana lalu lintas.
2. Merencanakan kebutuhan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan sarana prasarana keselamatan lalu lintas (rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas dan pagar pengaman) di jalan kabupaten, provinsi dan jalan nasional di ibukota kabupaten.
3. Pelaksanaan pemantauan dan penilaian atas tingkat pelayanan jaringan jalan, meliputi volume lalu lintas jalan, tingkat kecepatan rata-rata, kecepatan maksimum dan minimum;
4. Penyusunan ketentuan dan melakukan penilaian atas pelaksanaan kegiatan lalu lintas yang meliputi penetapan kecepatan maksimum dan minimum;
5. Penyusunan ketentuan pengaturan sirkulasi arus lalu lintas dan pembatasan penggunaan jenis kendaraan tertentu;
6. Pelaksanaan inventarisasi keadaan jaringan dan perlengkapan jalan;
7. Menyelenggarakan penyusunan analisa dampak lalu lintas di jalan kabupaten dan pada tempat-tempat pelayanan umum.

8. Melaksanakan kegiatan penyusunan kapasitas jalan kabupaten meliputi kondisi jaringan jalan, volume lalu lintas, kecepatan rata-rata dan lintas harian rata-rata (LHR).
9. Menyelenggarakan survey lalu lintas pada ruas jalan dan persimpangan.
10. Melaksanakan pengukuran unjuk kerja, tingkat pelayanan (level of service) pada ruas jalan dan persimpangan.
11. Melaksanakan penilaian terhadap dampak lalu lintas pada tempat-tempat pelayanan umum
12. Melaksanakan inventarisasi dan registrasi kelas jalan kabupaten
13. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
14. tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

6. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dengan tugas sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi;
5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana Transportasi.

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan dan Teknik Sarana Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas Perairan dan Udara;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian adalah pihak yang dijadikan sampel penelitian atau pihak yang diberikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini berjumlah 12 orang, yaitu Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kasubag Program, Kabid KTSP, Kasi Penerangan Jalan Umum, Mandor, Teknisi dan Anggota Dewan Kota Pekanbaru. Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur responden, dan tingkat pendidikan.

1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru, terdiri dari satu jenis kelamin saja yaitu jenis kelamin laki-laki. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
1	Laki-Laki	12	100%
2	Perempuan	-	-
	Jumlah	12	100%

Sumber : Data olahan Penelitian, 2021.

Berdasarkan Dari tabel V.1 diatas dapat diketahui responden dalam penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian yang terdiri dari Dinas Perhubungan,Kabid Program,Kabid KTSP,Kasi Penerangan Jalan Umum,Mandor, Anggota DPRD Kota dan Masyarakat.terdiri dari 12 orang jenis kelamin laki-laki (100%) dan tidak ada jenis kelamin perempuan. Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden di dominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 100%.

2. Tingkat Umur

Tingkat umur seseorang dapat mempengaruhi kognisi dan kematangan dalam pengambilan keputusan. Individu dengan umur yang lebih tua memiliki kecenderungan bekerja dan berpikir lebih matang. Hal ini disebabkan karena individu dengan umur yang lebih tua mencapai kestabilan dalam mengendalikan emosi dan pikiran. Hal ini berkaitan dengan umur responden dalam penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru berdasarkan Tingkat umur.

No	Umur	Responden	Persentase
1	≤ 30 tahun	2	17%
2	30 - 39 tahun	3	25%
3	40 - 49 tahun	6	50%
4	≥ 50 tahun	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data olahan penelitian, 2021

Dari tabel V.2 diatas terlihat bahwa responden penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru pada tingkat umur terbanyak ialah pada umur 40 - 49 tahun yaitu berjumlah 6 orang responden atau 50%,

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap cara pikir individu dalam mengambil keputusan, seperti dalam pelaksanaan pekerjaan. Pendidikan menjadi upaya individu untuk memahami dan memberikan penilaian terhadap sesuatu. Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir dan perilaku setiap individu. Pendidikan tersebut umumnya diperoleh melalui pendidikan formal maupun belajar dari lingkungan. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Di Kota Pekanbaru.berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Tingkat pendidikan	Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA/SLTA	6	50%
4	Diploma	-	-
5	Sarjana	5	42%
6	Pascasarjana	1	8%
Jumlah		12	100%

Sumber: Data olahan penelitian, 2021

Dari tabel V.3 diatas terlihat bahwa pada responden penelitian didominasi oleh tingkatan pendidikan SMA/SLTA atau sederajat yaitu berjumlah 6 informan dengan persentase 50%. Setelah menjelaskan dan menggambarkan kondisi

responden melalui indentitas jenis kelamin, umur dan tingkatan pendidikan selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai hasil penelitian.

B. Hasil Penelitian Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru

Setelah melakukan penelitian yang meliputi pengumpulan data dari hasil wawancara dengan informan penelitian, observasi di beberapa lokasi rayon dan melihat dokumentasi yang di berikan oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, maka selanjutnya melakukan pengolahan data serta menjelaskan hasil penelitian pada sub bab berikut ini.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap dimana sebuah program atau kegiatan akan disusun sebagaimana mengacu kepada tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyusunan rencana kerja tentunya harus memperhatikan aspek-aspek sumber daya organisasi baik pegawai, anggaran, peralatan dan ketentuan yang berlaku pada organisasi sehingga program yang dibuat tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan tujuan dari organisasi. Pada tahap perencanaan terdapat beberapa hal yang menjadi analisa penulis sesuai dengan teori implementasi kebijakan oleh Tachjan (2008:43) yang terdiri a) kemampuan staf perencanaan b) kemampuan organisasi perencanaan, c) kemampuan teknik analisis dan d) mutu informasi yang dibutuhkan. Berikut adalah sub indikator pada tahap perencanaan

a) Kemampuan Staf Perencanaan

Kemampuan staf perencanaan dalam merencanakan program adalah hal penting yang akan memberikan hasil yang optimal pada suatu pelaksanaan program.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala Sub Bagian Program terkait pertanyaan apakah staf yang membuat perencanaan pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu jalan adalah orang-orang yang punya kapasitas memadai dari segi perencanaan atau tidak. Narasumber menjelaskan bahwa :

“Staf perencanaan adalah orang-orang yang punya kapasitas memadai di bidangnya. Sudah tentu jika staf tersebut tidak memiliki kemampuan yang sesuai di bidangnya maka tidak akan berada di posisi tersebut, dengan kata lain bisa saja sudah dimutasi kebagian lain”. (Wawancara bersama Bapak Agru Maulana, S.ST selaku Kasubag Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Rabu 14 Juli 2021 pukul 14.46 WIB).

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama kepala Seksi Penerangan Jalan Umum menyampaikan bahwa:

“Mengenai perencanaan kebetulan saya sendiri kepala seksi penerangan umum yang mengurus perencanaan program. Jadi kita sudah pertimbangkan siapa saja staf atau personil yang sesuai sebagai pelaksana perencanaan ini. Artinya sesuai dengan background masing masing staf” (Wawancara bersama Bapak M. Ansar, ST selaku Kepala seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kamis 12 Agustus 2021 pukul 14.27 WIB).

Berdasarkan kedua wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa staf atau personil yang dipilih memiliki background atau latar belakang yang disesuaikan dengan bidang pekerjaannya. Namun narasumber lain dalam penelitian ini yaitu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono menyatakan bahwa:

“Kemampuan staf perencanaan secara profesional belum bisa dikatakan memadai. Jika kita lihat bersama misalnya dalam merencanakan perawatan pada lampu jalan bertiang diagonal yang berada tengah kota seandainya ada kerusakan kabelnya putus mereka hanya lewat kabel udara tidak diperbaiki secara seperti semula kabel tanam. Tiang diagonal kan jadinya jadi buruk. Saya rasa mereka belum dapat melakukan perencanaan ini dengan baik, salah satunya perencanaan pembelian peralatan dan bahannya yang memiliki kualitas rendah dan pemasangan yang kurang maksimal” (Wawancara

dengan Bapak Sigit Yuwono ST, selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Senin 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB)

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa menurut narasumber tersebut staf perencanaan belum bekerja dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari bahan dan alat penerangan yang direncanakan oleh staf perencanaan tidak memiliki kualitas yang baik. Ini

Selain itu peneliti juga menganalisis apa saja yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rencana program perawatan dan pemeliharaan lampu jalan serta bagaimana perencanaan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan di lapangan.

Hasil wawancara peneliti dengan narasumber Anggota DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla menyatakan bahwa:

“Terkait bagaimana rencana kerja Dinas Perhubungan yang dilaksanakan di lapangan dapat dilihat bahwa dalam rencana pemeliharaan selalu ada pendataan dimana lampu jalan yang jadi prioritas untuk keadaan penerangan kemudian pendataan tentang lampu –lampu harus yang rusak dan harus diganti dan penerapan teknologi penggunaan harus yang lebih rendah biaya. Kemudian perencanaan Dinas Perhubungan yang dilaksanakan di lapangan saya rasa sudah berjalan dengan baik, namun disisi lain dapat dilihat bahwa jika banyak pendataan lampu rusak tentu ini juga menunjukkan kinerja yang tidak baik dalam pelaksanaannya” (Wawancara dengan Bapak Roni Pasla SE selaku Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Senin, 16 Agustus 2021 pukul 12.43 WIB).

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan bagian dari perencanaan pelaksanaan ini dengan baik. Hanya saja dengan adanya pengerjaan atau perbaikan di lapangan dapat menimbulkan persepsi bahwa rencana pekerjaan yang dilakukan pada penerangan jalan umum belum

maksimal sehingga harus diperbaiki di berbagai titik dengan berbagai permasalahannya.

Kasubag Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Bapak Agru Maulana,S.ST melalui hasil wawancara penelitian mengatakan bahwa:

“Perencanaan sesuai dengan apa yang diajukan oleh bidang, dan bidang yang akan mengajukan nanti, perencanaanya apa nanti kami sesuaikan dengan anggaran. Kemudian akan dilihat pada anggaran itu cocok tidak dengan anggaran mereka. Kemudian pelaksanaan di lapangan untuk sejauh ini sepertinya sudah maksimal hal ini terlihat dari tagihan dahulu mencapai belasan Miliaran sedangkan sekarang tagihannya sudah 6 miliar berarti sudah maksimal apalagi sudah ada meterisasi” Wawancara bersama Bapak Agru Maulana,S.ST selaku Kasubag Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , Rabu 14 Juli 2021 pukul 14.46 WIB).

Sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama kepala Seksi Penerangan Jalan Umum menyampaikan bahwa:

“Sejauh ini kita melakukan perencanaan itu intens hanya saja pelaksanaanya tergantung ketersediaan APBD kita anggaran kita,begitu juga perawatan sejauh anggaran perawatan itu ada kita kerjakan” (Wawancara bersama Bapak M. Ansar,ST selaku Kepala seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kamis 12 Agustus 2021 pukul 14.27 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan kepala sub bagian program dan kepala seksi penerangan diketahui bahwa perencanaan ini sudah terlihat dilapangan, hal ini juga berjalan baik walaupun pada akhirnya penyelesaian masalah PJU akan terbentur oleh dana APBN.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru.terhadap kemampuan staff perencanaa, peneliti melihat dilapangan orang-orang yang terlibat dalam membuat perencanaan bukan orang-orang yang mempunyai kemampuan dalam membuat perencanaan Anggaran dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian dapat disimpulkan bahwa tahap perencanaan di lapangan belum berjalan dengan maksimal. Pertama, kurang maksimalnya staf perencanaan yang memiliki kapasitas sesuai bidangnya sehingga perencanaan program belum dapat berjalan dengan baik. Kedua, perencanaan program perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru belum dapat terlaksana karena keterbatasan APBD.

b) Kemampuan organisasi perencanaan,

Kemampuan organisasi dalam menganalisa SWOT adalah hal yang sangat diutamakan untuk kesuksesan sebuah program atau proyek. Analisis SWOT merupakan suatu teknik perencanaan strategi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu program atau proyek.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program dan juga kepala Seksi Penerangan Jalan Umum menyatakan bahwa staf perencanaan sudah memahami SWOT. Kemudian hasil wawancara peneliti dengan narasumber Anggota DPRD Kota Pekanbaru Roni Pasla menyatakan bahwa:

“Yang membuat perencanaan ini adalah pihak Dinas Perhubungan pada bagian PJU, yang menurut saya seharusnya tahu permasalahan dan kelebihan program mereka. Saya pikir harus karena di Dishub sendiri ada orang-orang yang ahli di bidang itu. Namun bisa saja secara teorinya mungkin sudah memahami tapi prakteknya belum” (Wawancara dengan Bapak Roni Pasla SE selaku Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Senin, 16 Agustus 2021 pukul 12.43 WIB).

Sejalan dengan hal yang diungkapkan oleh Bapak Roni Peneliti melakukan observasi langsung dan ditemukan bahwa kemampuan organisasi perencanaan pada

kenyataannya memahami apa itu SWOT baik secara teori hanya saja secara aplikasinya masih belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kota pekanbaru. terhadap kemampuan organisasi perencanaan peneliti melihat dilapangan kemampuan oraganisasi perencanaan tidak memahami apa itu SWOT baik teori dan prakteknya di lapangan.

Berdasarkan kutipan wawancara dan observasi langsung dilapangan tersebut peneliti menyimpulkan bahwa bagian staf perencanaan mengetahui SWOT secara teori namun pada aplikasinya sulit diterapkan. Terlepas dari siapa saja yang merencanakan program, maka ia harus memahami apa kelebihan, kekurangan, tantangan. Bisa jadi bagian perencanaan tidak memahami itu dalam perencanaan minimal harus memahami apa itu SWOT sehingga perencanaan sulit diaplikasikan di lapangan.

c) Kemampuan Teknik Analisis

Kemampuan ini adalah kemampuan untuk menemukan cara menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam hasil wawancara peneliti dengan narasumber Kasubag Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengenai apakah orang-orang yang terlibat di bagian perencanaan lampu penerangan jalan umum adalah orang-orang yang mempunyai latar belakang bagaimana memahami lampu sebagai pelaksana perawatan dan pemeliharaan lampu Penerangan Jalan umum, sebab lampu jalan mempunyai spesifikasi nya mulai spec internasional dan nasional.

“Saya dapat memastikan bahwa staf yang bekerja pada bidang masing masing adalah staf yang memiliki kemampuan di bidangnya. Namun tidak dapat dihindari bahwa staf ini sering diganti dikarenakan mutasi atau keperluan kedinasan lain. Jadi kurang efektifnya menurut saya yang tadinya analisis masalah dilakukan oleh staf A sudah matang, tapi karena ada pertukaran menyebabkan staf baru menganalisa ulang, disitu menurut saya kurang efisiennya”. (Wawancara bersama Bapak Agru Maulana, S.ST selaku Kasubag Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Rabu 14 Juli 2021 pukul 14.46 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa hendaknya staf PJU sebaiknya memiliki masa kerja yang cukup untuk menyelesaikan analisis perawatan PJU dan tidak sering diganti atau dirotasi sehingga analisis pekerjaan dapat diteruskan dengan hasil yang maksimal.

. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru, terhadap Kemampuan Teknik Analisis peneliti melihat dilapangan terjadinya pergantian staff dalam kurun waktu kurang 1 tahun.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas dapat diketahui bahwa bagian perencanaan jika sering diganti maka tidak bisa memahami analisis dengan baik. Hal ini dapat disebabkan oleh kemampuan organisasi yang kurang karena diduga terdapat orang-orang yang terlibat perencanaan tentang penerangan jalan umum orang-orang yang memiliki analisis berbeda-beda pada suatu permasalahan pada bidang Penerangan jalan ini.

d) Mutu informasi yang Dibutuhkan

Mengenai mutu informasi yang dibutuhkan maka peneliti menanyakan apakah bagian bidang sarana dan prasarana perawatan dan pemeliharaan lampu jalan mengetahui jumlah titik lampu yang mati atau padam dan apakah bagian

lampu jalan seperti kabid,kasi,teknisi dan mandor mengetahui jenis lampu penerangan jalan apa saja yang terpasang di seluruh Rayon di kota pekanbaru?

Peneliti melakukan wawancara dengan Mandor Mihwan Hasibuan menyatakan bahwa:

“Untuk berapa banyaknya titik lampu tahu,tapi penanganannya sulit membedakan mana yang urgent mana yang tidak urgent. Tapi kebanyakan terlalaikan karena salah satunya adalah peralatan yang tidak lengkap dan terkendala dengan waktu jugakan mereka hanya perbaiki kalau hanya bertiga atau atau satu mobil berapa sanggupnya saja dikerjakan”. (Wawancara dengan Bapak Mihwan Hasibuan selaku Mandor Penerangan Jalan , Selasa,13 Juli 2021 pukul 16.37 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa bidang sarana dan prasarana Dinas Perhubungan belum mampu menyediakan SDM yang cukup dan sarana mobil untuk memperbaiki lampu masih sangat minim.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan permasalahan yang sama dengan teknisi penerangan Bapak Aldian menyatakan bahwa;

“Permasalahan lampu mati itu tidak semua diketahui bidang penerangan lampu jalan, Hal ini tergantung dari laporan masyarakat Cuma jenis lampu yang terpasang di seluruh pekanbaru kami tau karena datanya ada.tergantung laporan masyarakat bahwa masyarakat itu lapor bahwa lampu kami mati disini. Melakukan pengecekan pun kan tidak rutin paling sekali datang seminggu,sekali dua hari kan lampu itu matinya kadang-kadang tidak serentak tiba-tiba sudah mati,sudah rusak saja.,tidak semuanya terjangkau luas di Pekanbaru ini paling Yang rutin itu dikontrol hanya jalan protokol jalan Sudirman ,Gajah Mada kalau kayak lampu-lampu di sudut-sudut kayak perumahan itu tergantung laporan masyarakat itu nanti kita bantu perawatan dan perbaikannya.lampu jalan yang lama kami pake Son-T sekarang beralih ke LED,lampu son-t masih sebagian digunakan seperti jalan arifin ahmad,arengka,cut nyak dien,jalan nangka.jalan protokol kebanyakan sudah menggunakan LED, jenis lampu ada son-t,LED jenis lampu LED ada yang merek panasonic ,bandel,kalau merk hannochs untuk perumahan .kalau jalan protokol jenisnya lampu son-t dan Led”. (Wawancara dengan Teknisi Penerangan Jalan Bapak Aldian jum'at, 23 Juli 2021 pukul 16:57 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa bidang Penerangan Lampu Jalan tidak bisa mengetahui mana saja penerangan jalan yang mati menandakan bahwa organisasi perencana di Dinas Perhubungan belum memiliki mutu informasi yang memadai. Seharusnya bidang ini memiliki jaringan ataupun pegawai yang setiap hari setiap malam memantau dimana lampu yang mati. Seperti tim survei pada pada kenyataannya tidak dimiliki oleh bidang Penerangan Lampu Jalan .

Peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat Heri menyatakan bahwa:

“Kalau masyarakat melapor kalau ada lampu jalan yang mati, biasanya kami lapor ke PLN tapi rupanya ke Dinas Perhubungan. Belum pernah ada saya lihat atau dengar kalau teknisi penerangan datang langsung kesini, apalagi disini bukan jalan protokol”.(Wawancara dengan masyarakat Bapak Heri Jalan Pesantren Kec Tenayan Raya, Selasa, 27 Juli 2021 pukul 17:27 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa Bidang PJU harus memberdayakan masyarakat untuk mengetahui titik mana lampu penerangan yang membutuhkan perawatan. Dalam hal ini Dinas Perhubungan memberikan akses kepada masyarakat untuk memberikan informasi bahwa di lingkungan kami ada lampu yang mati. Ini berkaitan dengan mutu informasi yang dapat dikatakan bahwa dari segi kualitas mutu informasi tentang penerangan jalan mereka kurang maksimal.

Mutu informasi yang dimiliki oleh bidang penerangan Jalan juga dapat dilihat pada hasil wawancara mengenai mengapa masih banyak Lampu Penerangan Jalan Umum yang menggunakan lampu ilegal atau non materialisasi .Apakah

prosedur dalam pemasangan lampu meterisasi begitu sulit sehingga banyak masyarakat enggan menggunakan lampu yang bermeterisasi.

Peneliti melakukan wawancara dengan bapak Mandor Mihwan Hasibuan menyatakan bahwa:

“Sebenarnya prosedurnya tidak sulit jika penerangan yang rusak di jalan protokol, sebab lampu ini sudah di meterisasi hampir seluruhnya sudah ber meterisasi sekitar 90% sampai sekarang masih penertiban. Prosedur tidak susah, call center sudah ada. di jalan paus lampu jalan protokol banyak memasang lampu sendiri, di karenakan mungkin lampu kita mati orang banyak memasang sendiri, jika lampu kita mati masyarakatnya tidak melapor bagian penerangan malahan mereka pasang sendiri agar lebih gampang dari pada melapor”. (Wawancara dengan Bapak Mihwan Hasibuan selaku Mandor Penerangan Jalan , Selasa, 13 Juli 2021 pukul 16.37 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat kesulitan dalam melaporkan lampu yang mati. Hal ini menjadi salah satu indikator yang menyebabkan mutu informasi Dinas perhubungan bagian Penerangan Jalan kurang maksimal

Pada sub indikator ini penulis juga menanyakan kepada masyarakat bagaimana pihak Dinas Perhubungan mensosialisasikan tentang Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) seperti layanan pengaduan (Call Center) dan manfaat dari Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU). Masyarakat Candra menyatakan bahwa:

“Saya belum ada mendengar sosialisasi kalau lampu jalan mati itu hubungi kemana. Awalnya saya tahu kalau an hubungi ke PLN, tapi ternyata di Dinas perhubungan. Ada nomor yang bisa dihubungi tapi sulit masuk, setelah dihubungi biasanya juga percuma, mereka tidak akan datang” . Wawancara dengan Bapak Candra salah satu masyarakat yang kerja di swalayan Jalan Parit Indah, Selasa 27 Juli 2021 pukul 17:48 WIB)

Sejalan dengan hasil wawancara tersebut peneliti melakukan observasi langsung dilapangan dan ditemukan bahwa mandor dan teknisi masih terkendala

dengan informasi letak lampu jalan umum yang mati atau rusak terlebih lagi jika tidak adanya aduan masyarakat perihal tersebut.

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Perhubungan mengenai informasi pengaduan belum merata keseluruh bagian masyarakat. Sehingga terdapat kendala pada penentuan lokasi letak lampu jalan umum yang mati ataupun rusak.

2) Tahap Implementasi Program dan Proyek-Proyek Pembangunan

Implementasi program adalah tahap dimana suatu program yang telah disusun dan ditetapkan kemudian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan, pada tahap ini segala bentuk program tersebut dilakukan secara operasional. Implementasi dapat dilihat pada 1 aspek pertama internal organisasi atau kemampuan serta apa yang dimiliki dan disiapkan oleh organisasi meliputi sumber daya baik manusia dan anggaran serta fasilitas dan aturan yang berlaku kemudian pada pelaksanaan program itu sendiri yang sering dinilai pada tahap pengawasan dan evaluasi.

Pada tahap implementasi sendiri tentunya terdapat faktor pendorong yang mendukung program dan kegiatan itu sendiri kemudian faktor penghambat yaitu aspek yang dapat menghambat pelaksanaan program. Khususnya pada program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan tentunya terdapat faktor yang mendorong dan mendukung sehingga program tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya.

a) Faktor Pendorong (*Facilitating Condition*)

Pada pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan tentunya terdapat faktor yang mendorong dan mendukung sehingga program

tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya. Faktor pendorong program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan ini dilihat dari beberapa indikator yaitu 1) komitmen para pemimpin politik., 2) kapasitas organisasi, 3) komitmen implementasi dan 4) dukungan.

Faktor pendorong program perawatan lampu jalan ini didukung oleh beberapa faktor. Faktor pertama yaitu komitmen para pemimpin politik.

Bapak M. Ansar, ST selaku Kepala seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui hasil wawancara penelitian mengenai pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum menyatakan bahwa:

“Kita selaku Dinas Perhubungan khususnya pada bidang Penerangan jalan bertanggung jawab atas penerangan jalan sebagai suatu kebutuhan masyarakat. Bidang ini sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi mereka, jika ada kendala itu biasanya memang diluar tupoksi atau jika ada fasilitas, sarana atau prasarana yang kurang hal ini datang dari anggaran yang belum cukup pada bidang ini” (Wawancara bersama Bapak M. Ansar, ST selaku Kepala seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kamis 12 Agustus 2021 pukul 14.27 WIB).

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan khususnya pada bidang Penerangan jalan sudah berkomitmen untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin, namun bagaimanapun juga masih terlihat bahwa penerangan jalan umum belum lah maksimal. Masih banyak titik titik yang tidak memiliki lampu penerangan yang memadai, tidak ada perawatan dan juga pemeliharaan.

Hasil wawancara peneliti dengan anggota DPRD Roni Pasla mengenai Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum menyatakan bahwa:

“Jadi memang Dinas Perhubungan harus selalu melakukan pendataan dan monitoring kemudian mereka ada data sendiri tentang kapan dipasang kemudian usia lampu tersebut dalam masa waktu tertentu juga dia pasti dengan sendirinya dia akan kehilangan daya karena dia punya limit sekian jam dia akan mati jadi datanya harus jelas sehingga tak perlu mereka jauh-jauh ngecek kesana kalau waktunya harus ganti ya harus ganti, Jadi menurut saya Dinas Perhubungan yang punya pekerjaan utama dalam mengurus Penerangan jalan ini”(Wawancara dengan Bapak Roni Pasla SE selaku Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Senin,16 Agustus 2021 pukul 12.43 WIB).

Pada hasil wawancara di atas diketahui bahwa anggota DPRD Roni Pasla menjelaskan bahwa Dinas Perhubungan lah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum. Peneliti menyimpulkan hasil wawancara di atas bahwa anggota DPRD yang seharusnya menampung aspirasi masyarakat dan mewakili masyarakat dalam mendapatkan haknya kurang diperhatikan.

Hasil wawancara dengan Mandor mengenai Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau menurut saya komitmen para pemimpin penerangan jalan ini masih kurang. Padahal sebenarnya penerangan itu kan akses juga keluar masuk kota pekanbaru cuman bagaimanapun juga kendalanya kami juga kurang mengerti. Kami tidak semua tau ada lampu yang mati kalau tidak ada laporan dari masyarakat lampu ini mati baru kami bergerak,tidak semua tau kecuali jalan yang sering dilewati.bagian untuk survei belum ada. Sumber daya manusia bagian survei belum ada .Kalau langsung mengadu banyak langsung ke kantor,karena banyak masyarakat mengadu ke PLN,PLN bilang bahwa kalau masalah lampu mati mengadunya ke dinas perhubungan kota pekanbaru

bukan ke PLN. Banyak masyarakat yang pandai melapor lewat call center begitu mereka siap melapor di telpon balik menuju ke lapangan mereka tidak merespon yang mana, mau diperbaiki kita tidak tahu makanya kita tinggal saja. Kalau masyarakatnya merespon kita telpon kita langsung perbaiki banyak masyarakat tidak merespon dan sumber dayanya juga terbatas untuk melakukan perbaikan". (Wawancara dengan Bapak Mihwan Hasibuan selaku Mandor Penerangan Jalan, Selasa, 13 Juli 2021 pukul 16.37 WIB).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut juga dapat disimpulkan bahwa komitmen para pemimpin masih perlu dimaksimalkan sehingga masyarakat dapat mendapatkan haknya dalam mendapatkan penerangan jalan umum. SDM dan fasilitas kerja seharusnya menjadi pendorong keberhasilan program ini, bukan sebagai penghambat pelaksanaan program. Masyarakat terlihat belum semuanya paham instansi mana yang akan didatangi atau hubungi jika terkendala atau bermasalah dengan penerangan jalan umum. Jika saja para pemimpin seperti kepala dinas, anggota DPRD dan pemimpin lainnya benar benar memperhatikan permasalahan di bidang ini maka pelaksanaan program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru akan berjalan dengan lancar dan minim hambatan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kota Pekanbaru, penulis melihat bahwa komitmen Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu jalan tidak berjalan dengan baik.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu jalan di kota

pekanbaru,dapat disimpulkan bahwa komitmen bidang penrerangan jalan umum belum melayani masyarakat semaksimal mungkin.

Terkait faktor pendorong terlaksananya implementasi ini juga dapat dilihat dari kapasitas organisasi instansi tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Anggaran untuk Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum terbatas atau kurang seluruh narasumber menyatakan anggaran kurang. Salah satu hasil wawancara dengan kepala Seksi Penerangan Jalan Umum menyampaikan bahwa:

“Perawatan untuk seluruh lampu jalan di pekanbaru 37.00 titik tadi itu memerlukan biaya besar diperkirakan kita punya uang sebanyak lebih kurang 200 miliar karena APBD kita terbatas tentu kita angsur tiap tahun” (Wawancara bersama Bapak M. Ansar,ST selaku Kepala seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kamis 12 Agustus 2021 pukul 14.27 WIB).

Kemudian peneliti mewawancarai narasumber Kepala Sub Bagian Program menyatakan bahwa:

“Fasilitas kita saat ini kita memang punya 5 mobil tangga hanya saja dari 5 ini 3 yang bisa beroperasi artinya yang sehat yang 2 rusak kenapa rusak karena mobilnya sudah melebihi umurnya sementara di kota pekanbaru ini kita mengikuti rayon /wilayah kerja PLN ,wilayah kerja PLN ada 5 rayon jadi minimal dari 5 rayon tiap-tiap rayon kita harus ada mobil artinya kita butuh 5 minimal mobil tangga jadi kita butuh mobil tangga 5 minimal yang sehat kalau dapat lebih”. (Wawancara bersama Bapak Agru maulana,S.ST selaku Kasubag Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru , Rabu 14 Juli 2021 pukul 14.46 WIB).

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas yang dimiliki Dinas perhubungan dalam urusan penerangan lampu jalan masih tergolong kurang.

Hal ini juga dikemukakan oleh Mandor penerangan yang menyatakan bahwa:

“Fasilitas masih kurang ,apalagi mobil yang ada sudah kadaluarsa banyak yang rusak di bengkel ada 2 buah mobil yang rusak di depan ada 2 yang

rusak tinggal satu yang beroperasi perlu penambahan dua lagi. total keseluruhan 5 mobil tangga 1 yang bisa beroperasi”. (Wawancara dengan Bapak Mihwan Hasibuan selaku Mandor Penerangan Jalan , Selasa, 13 Juli 2021 pukul 16.37 WIB).

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dimiliki untuk pelaksanaan program belumlah optimal. Penambahan armada, penambahan SDM yang ahli dibidangnya dan tenaga sivevi seharusnya menjadi salah satu fokus dinas perhubungan dalam mengimplementasikan program perawatan lampu jalan ini.

Peneliti mewawancarai Anggota DPRD Sigit Yuwono mengenai Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan hasil wawancara sebagai berikut;

“Jadi masalah pelaksanaan program untuk perawatan dan pemeliharaan mereka dengan alasan anggaran, mereka memiliki anggaran tidak terduganya terlalu kecil seharusnya dana operasionalnya harus dinaikan karena kan bola lampu kapan mati / padam dan kena musibah tidak ada. Seharusnya dana operasionalnya dibesarkan mereka jadi untuk perawatan dan pemeliharaan. bisa jadi di merawatnya perhitungannya kurang matang. Cukup banyak lampu yang mati di jalan-jalan protokol saja seperti di jalan SM Amin mati, banyak lampu yang mati sepanjang jalan, jalan di stadion naga sakti ,jalan Air hitam tidak ada lampu , jalan rajawali . Kalau kita melihat lampu menyala dan yang mati. 50% banyak yang mati. itu jalan ke gang-gang atau ke perumahan kalau kita melihat jalan-jalan protokol saja paling-paling 5% tapi kalau jalan ke perumahan ke jalan-jalan masuk ke daerah masyarakat mau itu 50% yang mati, karena kalau kita minta tolong perbaikan Barangnya tidak ada. Itu terus banyak yang mati. Makanya kembali lagi seharusnya masalah lampu jalan dikelola pihak ketiga kalau mereka masih mereka juga ya seperti ini terus”. (Wawancara dengan Bapak Sigit Yuwono ST, selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Senin 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB).

Berdasarkan wawancara dengan mandor dan Anggota DPRD Sigit diketahui bahwa komitmen organisasi belum maksimal. Hal ini dilihat dari terbatasnya sumber daya manusia juga terbatas untuk melakukan perbaikan, fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas dalam melakukan perawatan dan pemeliharaan

lampu jalan Hal ini tentu menghambat jalannya perawatan PJU dalam mengimplementasikan programnya. Kemudian teknisi tidak dapat langsung mengetahui jika ada lampu penerangan yang membutuhkan perawatan jika tidak dilaporkan oleh masyarakat. Kendati demikian adapun laporan dari masyarakat terkadang juga tidak bisa langsung diatasi karena ketika pihak teknisi menghubungi kembali masyarakat yang membuat pengaduan jarang yang merespon kembali untuk menunjukkan lebih detail lampu mana yang membutuhkan perbaikan. Wawancara penelitian dengan masyarakat Edi Saputra menyatakan bahwa:

“Kalau warga yang menelpon itu banyak, sayangnya nanti hanya sekedar dibuatkan laporan saja. Mereka berjanji akan datang dengan waktu dan hari yang sudah direncanakan. Mungkin karena terlalu banyak permasalahan akhirnya aduan masyarakat hanya tinggal janji teknisi saja”. (Wawancara dengan Bapak Edi Saputra selaku masyarakat Garuda Sakti Km 2.Selasa, 16 November pukul 20.00 WIB)

Dari kutipan wawancara tersebut juga diketahui bahwa kapasitas organisasi dalam melayani aduan masyarakat masih kurang, hal ini bisa disebabkan karena jumlah SDM yang kurang dalam menangani aduan masyarakat serta armada yang sangat terbatas yang dapat digunakan oleh teknisi untuk melaksanakan perawatan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum di kota pekanbaru.terhadap kemampuan organisasi, peneliti melihat dilapangan kemampuan organisasi berupa SDM seperti tenaga ahli dan tim survei Sarana dan Prasarana berupa Armada Kendaraan Oprasional masih kurang.Kendaraan Oprasional berupa mobil tangga yang beroperasi hanya ada 1.sehingga kurangnya

SDM dan Sarana Prasarana beserta anggaran terbatas mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja dalam perawatan dan pemeliharaan lampu jalan.

Maka dari itu,berdasarkan hasil wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan program perawatan dan pemeliharaan lampu jalan di kota pekanbaru,dapat disimpulkan bahwa Kemampuan Organisasi Belum Maksimal bisa kita lihat masih banyak nya permasalahan yang terjadi di lapangan..

Faktor pendorong terlaksananya program lainnya yaitu Dukungan dari kelompok kepentingan. Peneliti mewawancarai narasumber tentang apakah dukungan yang diperoleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru bidang Seksi Penerangan Jalan Umum untuk melayani masyarakat dalam hal penerangan jalan.

Wawancara bersama Bapak M. Ansar,ST selaku Kepala seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui hasil wawancara penelitian mengenai dukungan yang diberikan terhadap implementasi program ini mengatakan bahwa:

“Dukungannya dengan kita melihat penganggaran dari DISHUB sudah tepat atau belum kemudian pemerataan ,penempatan di seluruh wilayah kota pekanbaru tentu yang ini kita harus sama-sama buat perencanaan nya. tentu pihak PLN juga memberikan dukungan dan kita harapkan pihak-pihak swasta terutama pengembang developer mereka mungkin menyediakan peralatan seperti lampu ini yang kita harapkan partisipasi pihak swasta terutama pengembang”.(Wawancara bersama Bapak M. Ansar,ST selaku Kepala seksi Penerangan Jalan Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kamis 12 Agustus 2021 pukul 14.27 WIB).

Sejalan dengan hal tersebut peneliti melakukan observasi terhadap faktor pendorong dari program ini dan ditemukan bahwa masyarakat tidak menjadi faktor

pendorong .kebanyakan masyarakatnya acuh tak acuh. Terhadap penerangan lampu jalan yang mati.

Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut dapat diketahui faktor pendorong yang dapat menunjang jalannya program ini adalah dukungan. Baik dukungan dari PLN maupun dari Masyarakat adalah dukungan terbesar yang diterima oleh Dinas penerangan jalan pada Dinas Perhubungan. Selain itu dukungan dari pihak swasta juga diharapkan agar dapat membantu suksesnya program perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru.

b) Faktor Penghambat

Pada pelaksanaan program atau implementasi selain dari faktor pendukung terdapat faktor penghambat yang diindikasikan dapat menghambat dan memperlambat berjalannya suatu program yang telah ditetapkan, faktor penghambat tersebut dapat berasal dari terdiri dari a) banyaknya pemain (actors), b) terdapat komitmen atau loyalitas ganda, c) kerumitan yang melekat pada proyek, d) jenjang pengambilan keputusan yang banyak, e) waktu dan perubahan kepemimpinan.

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam terlaksananya suatu program adalah banyaknya pemain atau aktor dalam program tersebut. Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diketahui bahwa pelaksana program perawatan dan pemeliharaan khususnya pada kegiatannya langsung dilakukan oleh operasional Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru baik itu mandor maupun teknisi sehingga diketahui bahwa Dinas Perhubungan merupakan

pelaksana tunggal dari program perawatan dan pemeliharaan jalan. Dengan kata lain tidak ada banyak aktor dalam program ini.

“Perbaikan dan perawatan memang Dishub selain itu seperti pengadaan itu ada pihak ketiga, tetapi kembali lagi seharusnya masalah lampu jalan dikelola pihak ketiga jika mereka masih mereka juga ya seperti ini terus”. (Wawancara dengan Bapak Sigit Yuwono ST, selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Senin 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB).

“Selama ini yang melaksanakan perbaikan, pemeliharaan kemudian perawatan memang Dinas perhubungan, hanya mereka saja tidak ada pihak ketiga”. (Wawancara dengan Bapak Roni Pasla SE selaku Anggota Komisi IV DPRD Kota, Senin 16 Agustus 2021 pukul 12.43 WIB).

Dari hasil wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Pekanbaru diketahui bahwa dukungan dari pihak pemerintah Kota Pekanbaru dan DPRD Kota kepada Dinas perhubungan kota Pekanbaru dalam mengelola perawatan dan pemeliharaan lampu jalan telah diberikan secara maksimal tetapi tetap diberikan opsi agar dikerjakan oleh pihak ketiga atau pihak swasta agar lebih baik lagi tetapi dengan kondisi anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana yang masih kurang menjadikan faktor penghambat keberhasilan program perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum, kemudian dari jumlah sumber daya yang terbatas menjadi hambatan untuk meng cover atau menangani keluhan masyarakat Kota Pekanbaru dan wilayah Kota Pekanbaru yang luas tidak sebanding dengan jumlah sumber daya dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru hal ini tentu menjadi hambatan yang cukup serius melihat banyaknya masalah tetapi tidak dibarengi dengan pemenuhan sumber daya pelaksana program.

Pada indikator selanjutnya terdapat komitmen atau loyalitas ganda dapat dilihat pada wawancara yang diutarakan oleh beberapa masyarakat atau warga dari

rayon-rayon khususnya jalan-jalan yang bermasalah terhadap kondisi lampu penerangan jalan yang mati.

“Setahu saya ya hanya Dinas Perhubungan saja yang memperbaiki”. Wawancara dengan Bapak Sutrisno pedagang Jalan Paus Kota Pekanbaru, Selasa, 16 November 2021 pukul 21:09 WIB)

“Tidak ada dinas lain, kalau saya pernah liat ya memang hanya Dishub saja yang melakukan perawatan dan perbaikan lampu jalan ini”. Wawancara dengan Bapak Edi Saputra selaku masyarakat Garuda Sakti Km 2.Selasa, 16 November pukul 20.00 WIB)

“Hanya Dishub saja, kalau PLN itu ya masalah listrik saja jadi ya berbeda”. (Wawancara dengan Bapak Candra salah satu masyarakat yang kerja di swalayan Jalan Parit Indah, Selasa 27 Juli 2021 pukul 17:48 WIB)

Dari hasil wawancara dengan beberapa responden masyarakat yang berasal melihat bahwa memang teknisi atau staf Dinas perhubungan Kota Pekanbaru bekerja untuk instansinya saja. Pendapat yang sama di uraikan oleh informan masyarakat lainnya.

“Iya hanya Dinas Perhubungan saja tidak ada yang lain”. (Wawancara dengan masyarakat Bapak Heri Jalan Pesantren Kec Tenayan Raya, Selasa, 27 Juli 2021 pukul 17:27 WIB),

“Setahu saya memang Dinas Perhubungan yang memperbaiki kerusakan lampu jalan”. (Wawancara dengan Bapak Edi Saputra selaku masyarakat Garuda Sakti Km 2.Selasa, 16 November pukul 20.00 WIB)

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan penelitian beberapa perwakilan masyarakat di Kota Pekanbaru diketahui bahwa Dinas perhubungan Kota Pekanbaru merupakan aktor tunggal pelaksana program pemeliharaan dan perawatan lampu penerangan jalan, maka diketahui tidak adanya komitmen atau loyalitas ganda, dikarenakan pelaksanaannya merupakan aktor tunggal sehingga tidak terdapat tumpang tindih kewenangan, tetapi dalam pelaksanaannya juga tidak maksimal.

Faktor penghambat lain pada pelaksanaan program ini adalah kerumitan yang melekat pada proyek. Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan teknisi penerangan menyebutkan bahwa

“Pelaksanaan perawatan ini tergolong rumit. Jaringan lampu sudah banyak yang bermasalah ada yang hilang,ada jaringan nya yang rusak tidak dipakai lagi lampu,belum ada anggaran untuk kesitu diganti.Sebagian jalan belum ada lampu yang terpasang, sudah terpasang tapi banyak yang hilang. Jalan arifin ahmad itu jaringan nya itu udah tiap hari itu lagi berjalan pembenahan sudah direncanakan penggantian sudah mau diganti led cuman anggaranya belum ada. Di jalan pesantren masih mati katanya karena belum selesai jaringan nya sudah ada lampunya tapi belum selesai jaringan nya .Tapi masih banyak dicuri orang udah banyak yang hilang.Mungkin ada perencanaan tapi kami tidak tahu. kadang rasa memiliki masyarakat itu kurang”.(Wawancara dengan Teknisi Penerangan Jalan Bapak Adrian jum'at, 23 Juli 2021 pukul 16:57 WIB).

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa terdapat sejumlah kerumitan dalam pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan seperti sistem penerangan yang rusak dan hilang, anggaran yang tidak cukup serta masalah lain seperti adanya pencurian alat alat pemasangan kabel dan lampu penerangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Faktor lain yang menjadi penghambat dalam penelitian ini adalah jenjang pengambilan keputusan yang banyak dan waktu dan perubahan kepemimpinan. Dari kedua faktor tersebut waktu dan perubahan kepemimpinan menjadi salah satu penghambat pelaksanaan program perawatan lampu jalan ini. Hal ini dapat dilihat pada hasil wawancara peneliti dengan anggota DPRD Kota Pekanbaru Sigit Yuwono sebagai berikut:

“Namanya di PNS ini banyak bongkar pasang seharusnya walikota mempunyai target siapa yang mempunyai skill dan punya target juga , Kalau tidak tercapai target tentu harus dipindahkan seperti kabidnya,kasi dan yang di lapangan nya mandor harus mempunyai skill di lapangan nya harus mempunyai skill di bidang ini,jangan hanya kedekatan diangkat di dishub tapi

dia tidak tahu apa-apa di lapangannya. Masa perawatan lampunya berapa lama dia kita minta jangan bongkar pasang sebelum targetnya selesai. Kalau bongkar pasang si A upamannya bagiannya ini akhirnya diganti tentu masuk yang baru lagi berubah lagi, kita mau harus ada orang yang bertanggung jawab jadi melanjutkan jangan setelah diganti tidak dilanjutkan dari nol lagi". (Wawancara dengan Bapak Sigit Yuwono ST, selaku Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Senin 16 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa terdapat sejumlah kerumitan dalam pelaksanaan pemeliharaan penerangan jalan seperti sistem penerangan yang rusak dan hilang, anggaran yang tidak cukup serta masalah lain seperti adanya pencurian alat alat pemasangan kabel dan lampu penerangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Dari kutipan wawancara dan observasi diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dengan masa kerja yang cukup dan keamanan alat alat pemasangan maka staf atau personil dan teknisi penerangan dapat memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perawatan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru sangat penting karena lampu jalan pada saat malam hari membantu pejalan kaki, pengendara sepeda, dan pengemudi kendaraan lain untuk lebih baik melihat jalan yang mereka lalui. Kemudian lampu jalan juga berguna untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas bagi pengguna jalan. Sehingga mengurangi tingkat kecelakaan dan tindakan kriminal.

Setelah melakukan penelitian dengan mengumpulkan data secara langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian melakukan analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Perawatan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaannya belum maksimal di ketahui bahwa dalam hal kesiapan organisasi untuk melaksanakan program Perawatan Dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasana pendukung serta anggaran masih belum mencukupi sehingga banyak kegiatan yang belum dapat di laksanakan seperti pergantian lampu dengan jumlah kesediaan lampu yang terbatas, maka dari itu belum sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan mengenai Analisis Pelaksanaan Program Perawatan dan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum di Kota Pekanbaru maka dapat di sarankan, antara lain:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melakukan penambahan sumber daya manusia tenaga ahli baik teknisi, mandor, dan tenaga survei untuk melakukan pengawasan dan perbaikan lampu jalan yang rusak.
2. Kepada Dinas Perhubungan kota Pekanbaru untuk menambah sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan yang masih kurang dari segi jumlah sehingga belum dapat mengcover wilayah Kota Pekanbaru secara keseluruhan
3. Kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mempertimbangkan pemberian program kepada pihak ketiga atau swasta untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum yang mana dapat menekan angka anggaran .Sehingga pihak Dinas Perhubungan dapat menjadi pengawas dalam kegiatannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwan.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Alfabeta, Bandung.
- Ali, Faried, 2011. *Teori Dan Konsep Administrasi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Anderson, James. 2003. *Public Policy Making, Fifth Edition*. USA: Houghton Mifflin Company.
- Andry, Hendry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.
- Awang Azam, 2010, *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- A. W. Widjaja. 2004. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Rajawali.
- Badjuri, Abdul Kahar & Yuwono, Teguh, 2002, *Kebijakan Publik Konsep & Strategi*, Undip Press, Semarang.
- Budi Winarno, 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gaja Mada University Komputindo.
- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, JaiPress Inc, London-England.
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- G. Subarsono, 2008, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Hamim, Sufian, 2005, *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*, Pekanbaru, UIR Press.
- Hasibuan, Melayu. 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta : Bumi Aksara.

- Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs*, fourth edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Lester, James P dan Joseph Steward Jr., 2000. *Public Policy: an Evolutionary Approach.*, Belmont: Wadsworth.
- Manullang. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nugroho, D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta, PT.Elex Media Komputindo.
- Nugroho, D, Riant. 2006. *Publik Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: Elex.
- Nugroho, D, Riant. 2008. *Public Policy, Elekmedia Komputindo*, Jakarta; Elex.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan otonomi Daerah*. Jakarta: PT Garasindo.
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Pranasari dan Ferza, R. (2018). *Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Konservasi Energi untuk Efisiensi Energi di Sektor Penerangan Jalan Umum (PJU)*.
- Robbins, P, S. 2002, *Prinsip-Perinsip Prilaku Organisasi edisi Kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Samoedra, Wibawa. 2008. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Samoedra, Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Siswanto, 2011. *Pengantar Manajemen*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Subarsono, A.G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, teori dan aplikasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Subarsono. A.G. 2009. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Sugiyono, 2018 *Metode Penelitian Evaluasi (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi)* Bandung,: Alfabeta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Siagian, Sondang P. 2007. *Teori Pengembang Organisasi*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT. Bumi Akasara.
- Soleh dan Rochmansjah, 2010. *Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Fokusmedia, Bandung.
- Syafie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Rineka Cipta.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. PT. Gelora Aksara Pratama.
- Tachjan, H. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung : AIPI.
- Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Dministrasi Publik Indonesia (YPAPI) & Lukman Offset.
- Thoha, Miftah, 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Prenada Media Group.
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warwick, Donald P. 1979. *Integrating Planning and Implementation: A Transactional Approach*. Harvard Institute for International Development, Discussion Paper No. 63.
- Winarno. 2012. *Evaluasi Secara Sistematis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru, UIR Perss.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan jalan*.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 20 Tahun 2017 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum*.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau